

SKRIPSI

**KINERJA PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN RENCANA TATA
RUANG WILYAH DI KECAMATAN UJUNG BULU KABUPATEN
BULUKUMBA**

Disusun dan diusulkan oleh :

MUSDIANTO

Nomor Stambuk :105610468913



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

HALAMAN PENGAJUAN
KINERJA PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN RENCANA
TATARUANG WILAYAH DI KECAMATAN UJUNG BULU
KABUPATEN BULUKUMBA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan oleh

Musdianto

10561 0468913

Kepada

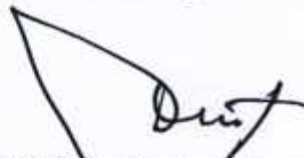
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019

PERSETUJUAN

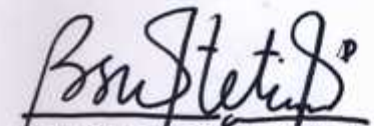
Judul Skripsi : Kinerja Pemerintah Dalam Pelaksanaan Rencana
Tata Ruang Wilayah Di Kecamatan Ujung Bulu
Kabupaten Bulukumba
Nama Mahasiswa : Musdianto
Nomor Stambuk : 1056 10468913
Program Studi : Ilmu Adminstrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I


Prof. Dr. Alias., M.S

Pembimbing II



Dr. Hj. Budi setiawati., M.Si

Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua jurusan
Ilmu Administrasi Negara


Nasrul Haq., S.Sos, M. PA

HALAMAN PENERIMAAN TIM

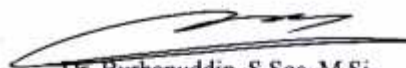
Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi oleh Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0007/FSP/A.1-VIII/I/40/2019, Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu, Tanggal 9 Februari 2019

TIM PENILAI

Ketua


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Sekretaris


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji

1. Prof. Dr. Alyas., M.s (Ketua)
2. Dr. Hj. Budi Setiawati., M.,Si
3. Dr. Burhanuddin., S.Sos, M.Si
4. Nasrul Haq., S.Sos, M.PA


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : MUSDIANTO
Nomor Stambuk : 1056 104689 13
Program Studi : Ilmu Adminstrasi Negara

Menyatakan Bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/ dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apa bila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akaDemik.

Makassar, 11 Februari 2019

Yang menyatakan

MUSDIANTO

ABSTRAK

Musdianto . Kinerja Pemerintah Dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba (Dibimbing Oleh Alyas Dan Budi Setiawati)

Masih adanya pemukiman yang kumuh. Pemukiman kumuh tentu membutuhkan penataan yang terintegrasi baik secara fisik / infrastruktur maupun non fisik agar infrastruktur tersebut menempati wilayah yang sesuai dengan peruntukannya. Sementara pemukiman liar yang secara legalitas tidak diakui keberadaannya selalu melahirkan dilema yang menjadi pilihan begitu sulit bagi pemerintah untuk memutuskan kunci penanganannya

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana kinerja pemerintah kabupaten bulukumba dalam melakukan penataan ruang wilayah diKecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah penelitian Deskriptif kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan, sehingga menemukan data yang objektif dalam rangka mengetahui kinerja pemerintah daerah Bulukumba dalam melakukan penataan wilayah yang ada di Kabupaten Bulukumba.

Tipe penelitian yang digunakan adalah fenomenologi yaitu peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman informan.

Dari hasil penelitian dari berbagai indicator pengukur yang telah ditanyakan kepada seluruh informan yang dianggap dapat memberikan informasi dalam mengukur kinerja dinas penataan ruang di kecamatan ujung bulu. Penulis dapat memberikan kesimpulan semua sudah berjalan dengan baik namun para pegawai tidak mesti langsung harus berpuas hati dan perlu mengevaluasi kembali kinerja mereka jika berjalan dengan baik maka harus dipertahankan dan meningkatkan kinerja mereka dan adapun beberapa dari kekurangan hasil kerja mereka harus memperbaiki dan lebih mengacu lagi pada SOP (Standar Oprasional Prosedur) yang berlaku untuk mencapai target program perencanaan kerja yang ingin dicapai dengan profesional dan bertanggungjawab terhadap hasil kerja yang dihasilkan.

Kata Kunci : *Kinerja Pemerintah*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kinerja Pemerintah Dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pada lembaran ini penulis hendak menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua, Ayahanda Mustafa LiLi. Ibunda Jumriah atas segala kasih sayang, cinta, pengorbanan serta do'a yang tulus dan ikhlas yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah SWT sehingga menjadi pelita terang dan semangat yang luar biasa bagi penulis dalam menggapai cita-cita. Ucapan terima kasih kepada saudara saya Irwan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat, bapak Prof. Dr. Alyas.,M.s selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj . Budi setiawati.,M.Si selaku pembimbing II yang telah berkenang meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing dan memberikan petunjuk yang begitu berharga dari awal persiapan penelitian hingga selesainya skripsi ini.

Penulis juga tak lupa hanturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim., S.E, M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj.Ihyani Malik., S.Sos,M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrul Haq., S.Sos, MPA selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selama ini turut membantu dalam kelengkapan berkas hal-hal yang berhubungan Administrasi perkuliahan dan kegiatan akademik. Dan Ibu Nurbiah Tahir.,S.Sos.,M.AP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara berkat motivasi yang diberikan penulis merasakan semangat yang luar biasa dalam melewati masa pahit dan masa sulit di akhir kuliah.
4. Kakanda syafarudin.,SE,MM dan Saudara Hendrawan,S.Sos.beserta *pemuda hijrah community* serta teman-teman angkatan 2013 Darmawin, S,Sos adinda Iswadi Amirudin, S.Sos yang selalu membantu dan menyemangati dalam penyelesaian skripsi.

Diakhir tulisan ini penulis memohon maaf kepada semua pihak atas segala kekurangan dan kehilafan, disadari maupun yang tidak disadari.

Makassar ,11 Februari 2019

Musdianto

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan.....	ii
Persetujuan	iii
Halaman Penerimaan Tim	iv
Pernyataan Karya Ilmiah.....	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep kinerja	7
B. Pengertian Tata Ruang Dan Penataan Ruang.....	12
C. Tujuan Asas Dan Klasifikasi Penataan Ruang.....	13
D. Tujuan Penataan Wilayah	15
E. Klasifikasi Penataan Ruang Atau Wilayah	16
F. Pelaksanaan penataan ruang atau wilayah	17
G. Perencanaan Tata Ruang Wilayah	18
H. Kerangka Pikir	19
I. Fokus Penelitian	21
J. Deskripsi Fokus Penelitian.....	21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	23
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	23
C. Sumber Data.....	23
D. Informan Penelitian.....	24
E. Teknik Pengumpulan Data.....	25
F. Teknik Analisis Data.....	25
G. Pengabsahan Data	27
H. Jadwal Penelitian	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	29
B. Profil Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba.....	38
C. Pembahasan Kinerja Pemerintah Dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukmba	51
1. Kualitas	51
2. Kuantitas	61
3. Ketepatan Waktu.....	67
4. Efektivitas	73
5. Komitmen Kerja.....	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA	90
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

<i>Nomor</i>	<i>Teks</i>	<i>Halaman</i>
1.	Daftar Informan Penelitian	24
2.	Daftar Penduduk Di Kecamatan Di Kabupaten Bulukumba	34
3.	Daftar Penduduk Menurut Jenis Kelamin Rasio Jenis Kelamin	37
4.	Daftar Nama Pegawai Dan Golongan Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba	49

DAFTAR GAMBAR

<i>Nomor</i>	<i>Teks</i>	<i>Halaman</i>
1.	Daftar kerangka pikir	20
2.	Daftar struktur organisasi dinas tata ruang kabupaten bulukumba	41

DAFTAR LAMPIRAN

<i>Nomor</i>	<i>Teks</i>	<i>Halaman</i>
1.	Gambar Rumah Di Pinggiran Sungai	
2.	Gambar Pemukiman Kumuh	
3.	Tabel Analisis Tata Bangunan Di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kinerja merupakan suatu hal yang harus di penuhi oleh para pegawai terhadap semua masyarakat karena merupakan tugas pokok sebagai pemangku dan pengendali kebijakan publik seharusnya selalu mengedepankan kepentingan masyarakat umum maka para pelayan publik harus meningkatkan kinerjanya karena sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat penting karena sebagai penggerak tercapainya sebuah kinerja yang maksimal.

Sumber daya manusia (SDM) di dalam sebuah organisasi adalah penentu yang paling penting bagi efektifnya atau berjalannya kegiatan di dalam suatu kelembagaan.kenerja dan Keberhasilan seseorang didalam suatu bidang banyakpekerjaa ditentukan oleh tingkat ptofesionalisme, kompetensi, danjuga komitmennya dalam bidang pekerjaan yang ditekuninya.

Dalam suatu organisasi, sumber daya manusia (SDM) bukan hanya sebagai alat dalam penghasilan tetapi juga mempunyai peran penting dalam kegiatan produksi suatu kelembagaan. Penempatan sumber daya manusia (SDM) sekarang bukan hanya sebagai alat produksi tetapi juga sebagai penentu atau penggerak berlangsungnya segala proses produksi aktivitas organisasi. Sumber daya manusia (SDM) memiliki peran besar dalam menentukan berkembangnya atau majunya sutau organisasi. Oleh sebab itu, kesuksesan suatu lembaga organisasi ditentukan pula bagaimana kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) di dalamnya.

Peraturan perencanaan tata ruang merupakan peraturan yang ditetapkan telah lebih dari setengah abad dikembangkan di Indonesia dengan dikembangkannya mata kuliah tata ruang di perguruan tinggi, maka tata ruang juga dapat dipelajari dari sudut pandang hukum sebagai tempat atau bingkai rumusan-rumusan di masa sekarang dan yang akan datang. Persoalan urbanisasi, manajemen transportasi yang buruk, *squatter* atau penghunian liar di daerah kumuh (*slums area*), kenakalan anak-anak (*juvenile delinquency*), masalah lingkungan, kriminalitas, sampah, khususnya polusi kesenjangan atau disparitas sosial warga perkotaan, sistem perekonomian dan sebagainya mengharuskan adanya langkah yang harus dipersiapkan terencana, bersasaran serta dilakukan dengan sistem kontrol sosial yang baik.

Aturan hukum pertama yang mengatur penataan ruang di Indonesia adalah *Stadvormings Ordonnantie (SVO) Staatblad 1948 No.168* atau Undang-undang tentang Pembentukan Kota dan *Stadvormings Verordening (SVV) Staatblad 1949 No.40* pemerintah Peraturan tentang Pembentukan Kota merupakan dasar hukum produk kolonial Belanda bersifat *sentralistik, rigid* (ketat), teknis, memberikan kewenangan kepada dewan *haminte* dalam melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan *haminte* (Pemerintah Daerah) tentang penataan ruang di Daerah. Pada sisi lain, aspek lingkungan dengan sistem drainase atau pengatusan yang terpelihara dan tertata ternyata dapat mengatasi problema yang senantiasa dilawan oleh pemerintah kota yakni banjir dan pencemaran serta kemacetan lalu lintas. Sejak tahun 1993 menanggapi diundangkannya Undang-undang No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, maka Adiputera Parlindungan membuat

kajian hubungan korelasi antara penatagunaan lahan tanah, laut dan/atau air serta udara, penataan kembali penguasaan dan kepemilikan tanah pertanian khususnya dipedesaan (*landreform*), pengadaan tanah untuk kepentingan tertentu, penetapan zonasi (*zoning*) khususnya di perkotaan dengan rencana atau skenario program pembangunan waktu itu adalah Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dituangkan dalam Ketetapan yang di keluarkan Majelis Permusyawaratan Rakyat beserta peraturan perundang-undangan operasionalnya.

Dalam pembentukan peraturan zonasi, klasifikasi dan definisi penggunaan lahan yang hukumnya jelas dengan begitu sangat diperlukan untuk menjadi landasan utama dan sebagai acuan untuk menentukan apakah suatu permohonan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang atau tidak. Klasifikasi penggunaan lahan yang jelas akan mempermudah menentukan apakah izin bias dikeluarkan atau ditolak. Sesuai dengan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bulukumba dalam pelaksanaan rencana tata ruang wilayah. Kebijakan pembangunan yang akan berkelanjutan/jangka panjang tentu tidak bisa dilepas dari instrumen hukum tata ruang. Melalui instrumen tata ruang banyak kepentingan pembangunan baik antara daerah dan pusat, antar daerah, antar sektor, maupun antar pemangku kepentingan dapat dilakukan dengan serasi, seimbang, selaras dan terpadu

Permasalahannya, bahwa meningkatnya kebutuhan ruang dalam pelaksanaan pembangunan berimplikasi terhadap penggunaan ruang yang tidak

sesuai dengan rencana peruntukkan. Padahal baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota telah disusun Rencana Tata Ruang Wilayah. Melalui rencana tata ruang wilayah ini penggunaan ruang telah dipilih-pilih berdasarkan fungsi dan struktur ruang. Fungsi dan Struktur ruang inilah yang seharusnya menjadi dasar dalam penggunaan ruang. Struktur ruang memuat susunan pusat-pusat pemukiman dengan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendorong kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sementara itu, kunci ruang memuat distribusi peruntukan ruang didalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi dilindungi dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang sebagaimana ditetapkan dalam pelaksanaan rencana tata ruang wilayah menimbulkan berbagai permasalahan lebih lanjut, seperti tumpang tindih penggunaan ruang, alih fungsi lahan, konflik kepentingan antar sektor (kehutanan, pertambangan, lingkungan, prasarana wilayah, dan lainlain), dan konflik antara pusat dan daerah, konflik antar daerah, serta kemerosotan dan kerusakan lingkungan hidup

Salah satu perangkat pengendalian pemanfaatan ruang adalah perizinan, Izin yang berlaku pada sebagian besar daerah di beberapa daerah di Indonesia begitupun daerah Bulukumba hanya sampai pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tidak sampai kepada izin memanfaatkan bangunan, dimana pelanggaran pemanfaatan ruang berawal. Di sisi lain, izin yang dikeluarkan oleh masing-masing kantor/SKPD tidak mengacu kepada rujukan yang sama, yaitu rencana

rinci tata ruang, sehingga sering terjadi kurang koordinasi. Untuk itu, masing-masing daerah harus memiliki rencana rinci dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang. Secara organisasi, mekanisme perizinan satu atap cukup jelas untuk menekan pelanggaran pemanfaatan ruang, sebab memungkinkan terjadi koordinasi yang lebih intensif antara kantor-kantor yang terkait didalam memberikan izin.

Salah satu alasan penulis mengambil judul kinerja pemerintah dalam pelaksanaan tata ruang wilayah karena sampai saat ini susunan tata ruang yang ada di kabupaten Bulukumba belum tertata dengan baik sehingga memunculkan berbagai persoalan yang berdampak bagi masyarakat kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba yang menjadi permasalahan yang ada yaitu masih adanya pemukiman yang kumuh. Pemukiman kumuh tentu membutuhkan penataan yang terintegrasi baik secara fisik / infrastruktur maupun non fisik agar infrastruktur tersebut menempati wilayah yang sesuai dengan peruntukannya. Sementara pemukiman liar yang secara legalitas tidak diakui keberadaannya selalu melahirkan dilema yang menjadi pilihan begitu sulit bagi pemerintah untuk memutuskan kunci penanganannya, Disatu sisi pemerintah harus melakukan relokasi karena letaknya biasanya pada daerah bantaran sungai yang berpotensi menimbulkan bencana, akan tetapi di sisi lain semua itu terhambat faktor kemanusiaan dan keadilan Khusus untuk penataan permukiman kumuh, selama ini pemerintah biasanya terjebak oleh identifikasi masalah kawasan pada sudut pandang perbaikan fisik. (*physicallyimprovement*) <https://bulukumba1.blogspot.co.id/2016/09/pemukiman-kumuh-ditata-atau-digusur.html>)

Inilah yang menjadi alasan peneliti mengambil penelitian yang berjudul *Kinerja Pemerintah Dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kecamatan ujung bulu Kabupaten Bulukumba*. Penulis ingin melihat seperti apa kinerja pemerintah dalam melakukan rencana tata ruang wilayah di daerah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana kinerja pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam melakukan penataan ruang wilayah di Kecamatan ujung bulu Kabupaten Bulukumba ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana kinerja pemerintah kabupaten bulukumba dalam melakukan penataan ruang wilayah di Kabupaten Bulukumba

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pendidikan ilmu sosial administrasi Negara khususnya Penataan Ruang dalam hal ini pengawasan pemerintah atas pengendalian pemanfaatan ruang.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan bagi masyarakat umum yang berada di Kabupaten Bulukumba untuk mendukung terhadap pengendalian pengawasan pemanfaatan ruang wilayah Di Kabupaten Bulukumba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Menurut Mangkunegara (2006), Kinerja juga dapat didefinisikan sebagai hasil kerja secara kuantitas dan kualitas yang dapat ditemukan oleh seorang karyawan dalam menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. (Prawirosentono, 2008) Kinerja yaitu hasil kerja yang dapat ditemukan oleh karyawan atau dari kumpulan orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mendapatkan tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan norma maupun etika.

Menurut Bambang Guritno dan Waridin (2005) kinerja adalah perbandingan hasil kerja yang didapat oleh seseorang dengan standar yang sudah ditentukan. Dan menurut Hakim (2006) mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja yang didapat oleh seseorang yang disesuaikan dengan tugas atau peran seseorang tersebut didalam suatu perusahaan pada suatu periode waktu tertentu, yang dihubungkan dengan suatu ukuran nilai atau standar tertentu dari perusahaan dimana seseorang tersebut bekerja.

Kinerja sering disebut sebagai tolak ukur tingkat atau prestasi keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui bila seseorang atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa target-targer atau tujuan-tujuan

tertentu yang ingin dicapai. Tanpa ada target atau tujuan, kinerja seseorang atau organisasi tidak akan diketahui ketika tidak ada tolak ukurnya.

Menurut Keban (2004) kinerja adalah persamaan dari “*performance*” yang selalu diterjemahkan sebagai penampilan, untuk prestasi atau rasa. Kinerja ialah tingkat pencapaian tujuan organisasi secara berkesinambungan, dan menurut Mahsun (2006) kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program, kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi sasaran, tujuan, organisasi yang berada dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Hal ini didukung juga oleh pendapat Cokroaminoto (2007) pengertian kinerja pegawai menunjuk dari kemampuan pegawai dalam melakukan semua tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas –tugas tersebut biasanya berdasarkan indikator – indikator pencapaian yang selesai ditetapkan.

2. Pengukuran Kinerja

Menurut Fuad Mas’ud (2004) menyatakan ada lima cara yang dipakai dalam mengukur kinerja karyawan secara individu, antara lain sebagai berikut :

a. Kualitas

Tingkat dimana hasil aktivitas yang dikerjakan hampir sempurna dalam artian menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan aktivitas ataupun memenuhi tujuan yang diinginkan dari suatu aktivitas.

b. Kuantitas

Jumlah yang dicapai dikatakan dalam istilah sejumlah siklus, jumlah unit aktivitas yang tercapai.

c. Ketepatan Waktu

Tingkat suatu aktivitas terselesaikan pada waktu awal yang diharapkan dilihat dari sudut koordinasi dan hasil output beserta memaksimalkan waktu yang tersedia buat aktivitas orang lain.

d. Efektivitas

Tingkat pengguna sumber daya manusia (SDM) dalam organisasi dengan maksud meningkatkan keuntungan atau mengurangi kerugian dari setiap unit dalam memakai sumber daya manusia (SDM).

e. Komitmen Kerja

Tingkat dimana pegawai/karyawan memiliki komitmen kerja dengan perusahaan dan tanggung jawab kerja dengan perusahaan.

Seperti halnya diungkapkan oleh Mustopadjadja (2003) menyebutkan bahwa ada beberapa jenis indikator yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja organisasi yaitu sebagai berikut :

- 1) Indikator masukan (*input*) adalah semua sesuatu yang diperlukan supaya kegiatan pelaksanaan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, dapat berupa dana sumber daya manusia (pegawai). Informasi peraturan perundangan atau peraturan kebijakan dan sebagainya.
- 2) Indikator proses yaitu semua besaran dan menunjukkan upaya atau aktifitas yang dikerjakan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran.

- 3) Indikator keluaran atau (*output*) yaitu semua sesuatu yang diinginkan langsung digunakan pada suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non-fisik.
- 4) Indikator hasil (*outcome*) yakni segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah (efek langsung), hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan.
- 5) Indikator manfaat (*benefit*) yaitu semua sesuatu yang teerkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan, menggambarkan manfaat yang didapatkan dari indikator hasil, menunjukkan hal-hal yang diinginkan untuk dicapai jika keluaran dapat terselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan waktu).
- 6) Indikator dampak (*impact*) adalah pengaruh yang dihasilkan baik negatif maupun positif dari manfaat yang didapatkan dalam hasil kegiatan, baru dapat diketahui dalam jangka waktu panjang atau menengah Ini menunjukkan dasar pemikiran dilaksanakannya kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

3. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan

Kinerja adalah sesuatu yang sudah selesai atau hasil pekerjaan dalam kegiatan atau aktivitas maupun program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan beserta sasaran yang pernah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dikerjakan dalam jangka waktu tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam Yeremias T. Keban(2004 : 203) untuk melaksanakan

kajian lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penilaian kinerja di Indonesia, dapat dilihat beberapa faktor penting sebagai berikut :

- a. Kejelasan tuntutan hukum atau peraturan perundangan untuk melakukan penilaian secara benar dan tepat. Dalam kenyataannya, seseorang menilai secara subyektif dengan penuh bias akan tetapi tidak ada suatu peraturan hukum yang dikendalikan ataupun mengatur sifat tersebut.
- b. Manajemen sumber daya manusia (MSDM) yang berlaku mempunyai fungsi dan proses yang begitu menentukan efektivitas penilaian kinerja. Aturan main menyangkut siapa yang harus menilai, kapan menilai, kriteria apa yang dilakukan dalam sistem penilaian kinerja seharusnya diatur dalam manajemen sumber daya manusia (MSDM) tersebut. Dengan demikian manajemen sumber daya manusia (MSDM) juga merupakan pola utama keberhasilan sistem penilaian kinerja.
- c. Kesesuaian diantara paradigma yang diikuti oleh manajemen suatu organisasi dengan tujuan penilaian kinerja. Ketika paradigma yang diikuti masih berorientasi pada manajemen klasik, maka penilaian selalu bias kepada pengukuran tabiat ataupun karakter pihak yang dinilai, sehingga prestasi yang menjadi fokus utama kurang dipandang
- d. Komitmen para manajer atau pemimpin organisasi public begitu pentingnya penilaian suatu kinerja. Bila mereka sering memberikan komitmen yang tinggi dalam efektivitas penilaian kinerja, maka para penilai yang ada

dibawah otoritasnya akan sering berusaha mengerjakan penilaian secara benar dan tepat.

Sedangkan menurut Rahmatullah (2009), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah:

- a. Faktor individual yang datang dari kemampuan dan latar belakang keahlian, demografi dan motivasi kerja beserta disiplin kerja.
- b. Faktor psikologis yang datang dari persepsi, *attitude*, personality dan pembelajaran.
- c. Faktor organisasi terdiri dari bentuk atau sistem organisasi sumber daya, kepemimpinan, komunikasi, lingkungan kerja, kompensasi, budaya kerja, budaya organisasi, penghargaan, struktur, diklat dan *job design*.

B. Pengertian Ruang, Tata Ruang, dan Penataan Ruang

Menurut UU No. 26 Tahun 2007 (UUPR), bahwa Ruang merupakan tempat yang meliputi ruang udara, ruang darat, dan ruang laut, termasuk ruang dimuka bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, mengerjakan kegiatan, dan menjaga kelangsungan hidupnya.

Menurut para ahli pengertian ruang yaitu :

1. D.A. Tisnaadmidjaja

Ruang adalah wujud fisik wilayah dalam dimensi geometris dan geografis yang merupakan tempat bagi manusia dalam melakukan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak.

2. Jayadinata

Ruang ialah semua permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfer, wadah hidup tumbuh - tumbuhan, hewan dan manusia.

3. Samadi

Ruang merupakan tempat bagi komponen-komponen lingkungan hidup dalam melakukan setiap proses, yaitu saling mempengaruhi (interaksi), saling berhubungan (interelasi), dan saling ketergantungan (interdependensi).

4. Newton

Ruang ialah suatu kuantitas yang mutlak ada tanpa melihat keberadaan ataupun distribusi materi alam semesta dan menurut UUPR Tata Ruang merupakan wajah struktur ruang dan pola ruang, Sedangkan Penataan Ruang yaitu suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pemanfaatan ruang.

C. Tujuan, Asas dan Klasifikasi Penataan Ruang

1. Asas Penataan Ruang

Berdasarkan Pasal 2 UUPR ditegaskan sebagai berikut. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang dilaksanakan berdasarkan asas:

a) Keterpaduan

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” ialah bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mengintegrasikan semua kepentingan yang bersifat lintas wilayah, lintas pemangku kepentingan, dan lintas sektor

kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, ialah pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

b) Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” yaitu merupakan penataan ruang dilaksanakan dengan mewujudkan keserasian antara pola ruang dan struktur ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan.

c) Keberlanjutan

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memerhatikan kepentingan generasi mendatang.

d) Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan

Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” yaitu bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dengan sumber daya yang ada di dalamnya beserta menjamin terbentuknya tata ruang yang berkualitas

e) Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” ialah bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

f) Kebersamaan dan kemitraan

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” yakni bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan menurunkan seluruh pemangku kepentingan.

g) Perlindungan kepentingan umum

Yang dimaksud dengan “perlindungan kepentingan umum” yaitu bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

h) Kepastian hukum dan keadilan

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” merupakan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat beserta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian

i) Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” ialah bahwa pelaksanaan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik , pembiayaannya, prosesnya, maupun hasilnya.

D. Tujuan Penataan Wilayah

Pelaksanaan Penataan Ruang bertujuan untuk mewujudkan penataan wilayah nasional yang produktif, nyaman, aman, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. Terbentuknya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;

- b. Terbentuknya keterpaduan didalam penggunaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
- c. Terbentuknya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan pengaruh negatif terhadap lingkungan disebabkan pemanfaatan ruang

E. Klasifikasi Penataan Ruang Atau Wilayah

Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan :

- 1) Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dengan sistem internal perkotaan.
- 2) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama daerah terdiri atas daerah lindung dan daerah budi daya.
- 3) Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah kabupaten/kota, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah nasional
- 4) Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang daerah perkotaan dan penataan ruang daerah perdesaan.
- 5) Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan dengan memperhatikan:

- 1) Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana
- 2) Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan,

lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan

3) Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

Penataan ruang wilayah provinsi, penataan ruang wilayah nasional, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilaksanakan secara berjenjang dan komplementer. Penataan ruang wilayah nasional sebagai ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang meliputi ruang udara, ruang darat, dan ruang laut, termasuk ruang dimuka bumi sebagai satu kesatuan. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang udara, ruang darat, dan ruang laut, merupakan ruang di dalam bumi beserta dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Ruang udara dan ruang darat, pengelolaannya diatur dengan undang-undang.

F. Pelaksanaan Penataan Ruang Atau Wilayah

Kegiatan pembangunan adalah bagian terpenting dan tidak dapat terpisahkan dari proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Indonesia salah satu sebagai negara yang mengikuti paham *welfare state* berkewajiban untuk dapat menyelenggarakan pembangunan dan memanfaatkan secara optimal beberapa sumber daya yang ada guna memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya. Kewajiban negara ini diperkuat dengan dicantumkannya dalam konstitusi negara ialah pada Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara mempunyai kuasa atas bumi, air dan kekayaan alam yang ada didalamnya untuk dipakai sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dengan maksud lain, ketentuan ini bermakna bahwa negara

dengan beberapacara dengan tanpa alasan apapun dituntut buat dapat mensejahterakan rakyatnya.

Di dalam proses penyelenggaraan pembangunan yang mensejahterakan tentu tidak segampang membalikkan telapak tangan ataupun dapat secara ideal berjalan bagaimana yang dikehendaki oleh rakyat atau yang termasuk dalam konstitusi negara. Hal ini harus dimengerti dan disadari bahwa kegiatan pembangunan selama ini juga di negara manapun bukan tanpa hambatan atau masalah.

Demikian juga yang terjadi di negara Indonesia yang merupakan negara berkembang dengan kunci pemerintahan yang masih inkonsisten. Hadirnya konsep otonomi daerah yang digulirkan sejak 1999 hanya merupakan intuisi sesaat yang berpengaruh oleh euforia sementara mengenai pola pemerintahan yang dianggap ideal adalah perubahan system pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik yang kenyataannya dapat dibilang masih ragu dan belum terbukti keefektifaannya

G. Perencanaan Tata Ruang Wilayah

Perencanaan tata ruang atau wilayah ialahsesuatu proses dapat menentukan penyusunan ruang dan pola ruang yang seperti struktur dan penetapan rencana tata ruang. Nasional,Provinsi dan Kabupaten/Kota mencakup ruang udara, ruang darat, dan ruang laut, termasuk ruang dimuka bumi. Penyusunan rencana tata ruang wilayah Nasional harus melihat Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, Perkembangan permasalahan regional dan global, beserta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional, Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi, Keselarasan aspirasi pembangunan nasional

dan pembangunan daerah, daya tampung lingkungan hidup dan daya tampung dukung, rencana tata ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Rencana tata ruang wilayah Nasional suatu saat dapat menjadi acuan terhadap rencana tata ruang provinsi, kabupaten/kota. Dalam hal perencanaan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten dan Kota mengacu kepada Provinsi, petunjuk dan Pedoman pelaksanaan bidang penataan ruang, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten harus memperhatikan:

- a. Perkembangan permasalahan provinsi dan hasil kajian implikasi penataan ruang Kabupaten
- b. Upaya meratakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten
- c. Keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;
- d. Daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup
- e. Rencana pembangunan jangka panjang daerah
- f. Rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan;
- g. Rencana tata ruang daerah strategis Kabupaten.

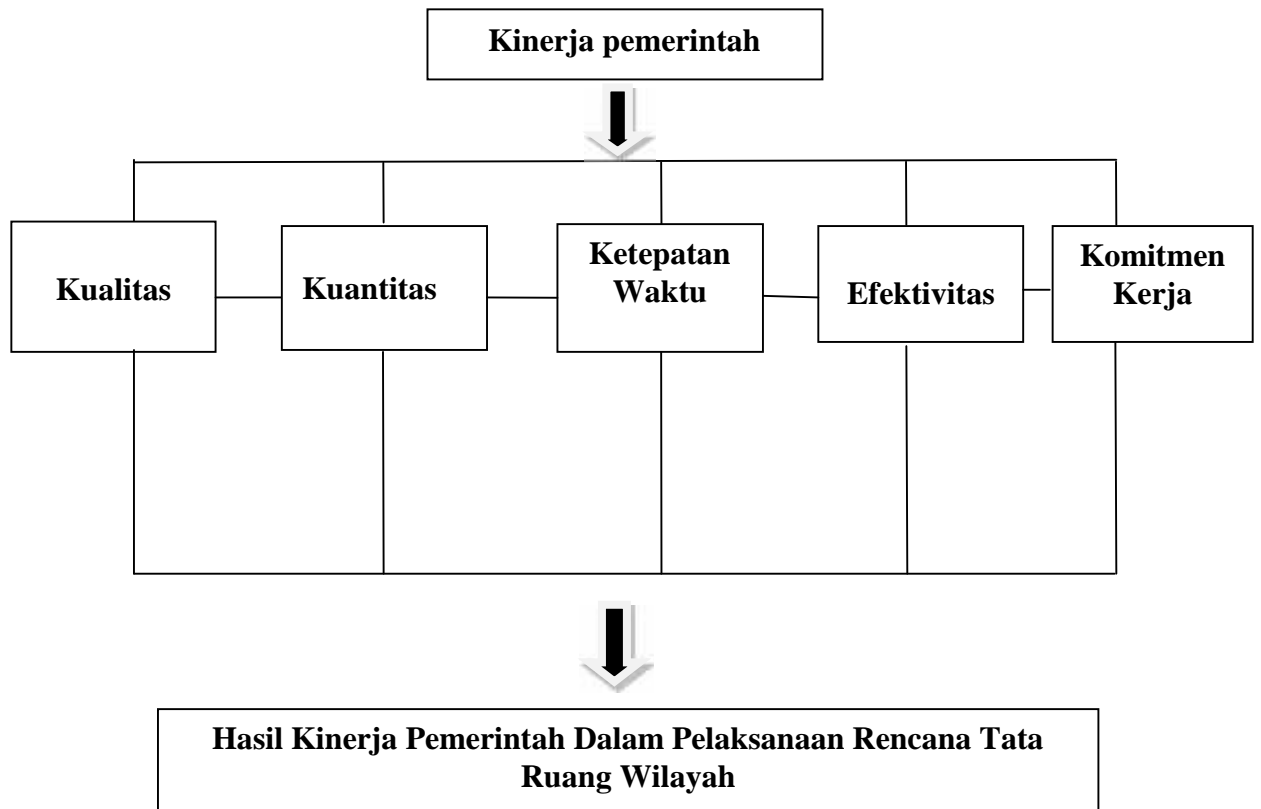
H. Kerangka Pikir

Kinerja merupakan sebagai hasil kerja yang didapat oleh seseorang yang disesuaikan dengan tugas atau peran seseorang tersebut didalam suatu perusahaan pada suatu periode waktu tertentu, yang dihubungkan dengan suatu ukuran nilai atau standar tertentu dari perusahaan dimana seseorang tersebut bekerja, dalam hal ini penulis menggunakan teori Fuad Mas'ud (2004) yang berfokus pada lima indikator yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan

waktu, efektivitas dan komitmen kerja, teori tersebut dianggap memudahkan peneliti untuk melihat seperti apa kinerja pemerintah dalam pelaksanaan rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Bulukumba.

Adapun gambar kerangka pikir adalah sebagai berikut:

Gambar Kerangka Pikir:



I. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah kinerja pemerintah dalam pelaksanaan rencana tata ruang wilayah yang ada di Kabupaten Bulukumba yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektifitas, dan komitmen kerja.

peneliti ingin melihat seperti apa kinerja pemerintah dalam melakukan penataan ruang wilayah tersebut.

J. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Kualitas

Kualitas merupakan hasil kerja yang dilakukan pada saat menjalankan tugas dan dilihat dari kemampuan atau skill yang dimiliki oleh seseorang.

2. Kuantitas

Kuantitas adalah jumlah yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam melakukan penataan ruang untuk melancarkan tugas tersebut.

3. Ketepatan waktu

Tingkat suatu aktivitas yang dapat diselesaikan oleh Dinas Tata ruang pada waktu awal yang diinginkan dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output

4. Epektifitas

Merupakan kinerja yang maksimal sumber daya manusia dari para dinas tata ruang dengan maksud meningkatkan keuntungan atau mengurangi kerugian dari setiap unit dalam memakai sumber daya manusia.

5. Komitmen Kerja

Komitmen kerja adalah tingkat loyalitas yang dimiliki oleh aparat dinas tata ruang dalam mempertanggung jawabkan tugas dan fungsinya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama 2 bulan mulai dari bulan oktober sampai bulan desember.

Adapun lokasi yang dikunjungi yakni Dinas Tata Ruang , peneliti ingin melihat bagaimana kinerja pemerintah dalam pelaksanaan rencana tata ruang wilayah di Kecamatan ujung bulu Kabupaten Bulukumba

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah penelitian Deskriptif kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan, sehingga menemukan data yang objektif dalam rangka mengetahui kinerja pemerintah daerah Bulukumba dalam malakukan penataan wilayah yang ada di Kabupaten Bulukumba.

Tipe penelitian yang digunakan adalah fenomenologi yaitu peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman informan.

C. Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan observasi dengan cara pengamatan langsung dilokasi yang menjadi objek penelitian dan wawancara langsung secara terbuka sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Penulis melakukan wawancara dengan informan menggunakan pedoman wawancara.

2. Data skunder, ialah data yang diambil dari berbagai referensi yang relevan dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis memakai buku-buku yang berkaitan dengan penataan wilayah.

D. Informan Penelitian

Adapun informan pada penelitian ini adalah:

Tabel Informan I.2

No	Nama	Inisial	Jabatan	Keterangan
1	Drs. Muhammad amry	MA	Kepala dinas tata ruang wilayah/sekertaris	1
2	Syafriadi. ST. MT	SF	Kepala bidang tata ruang	1
3	Ahmad Darfin S.Pd	AD	Kepala seksi pelaksanaan dan penataan ruang	1
4	A.Syahrul, ST. M.Ap	AS	Kepala seksi Pengendalian dan pemanfaatan tata ruang	1
JUMLAH				

E. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi (pengamatan) adalah pengamatan data yang dilaksanakan dengan pengamatan penulis secara langsung di lapangan mengenai penataan wilayah yang diterapkan oleh pemerintah daerah Bulukumba dalam melakukan penataan wilayah yang ada di Kabupaten Bulukumba
- b. Wawancara adalah dimana penulis melakukan interview atau wawancara terhadap apa yang dilakukan daerah Bulukumba dalam melakukan penataan wilayah yang ada di Kabupaten Bulukumba. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi penelitian mengenai rencana tata ruang wilayah daerah Bulukumba dalam melakukan penataan wilayah yang ada di Kabupaten Bulukumba
- c. Studi kepustakaan (Dokumen) adalah dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini tentang permasalahan-permasalahan yang sedang diteliti meliputi data penataan wilayah Kabupaten Bulukumba

F. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengolah data dimana data yang diperoleh, dilaksanakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan kasus yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Menurut Miles and Huberman (Dalam Sugiyono, 2012:91-99) menjelaskan bahwa analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data sama dengan merangkum, memfokuskan pada hal yang lebih penting, memilih hal-hal yang pokok, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas dalam hal ini gambaran kinerja pemerintah daerah Bulukumba dalam melakukan penataan wilayah yang ada di Kabupaten Bulukumba dan mempermudah dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk menguraikan secara singkat tentang bagaiman kinerja pemerintah daerah Bulukumba dalam melakukan penataan wilayah yang ada di Kabupaten Bulukumba yang diterapkan dalam pengembangan berbentuk teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan (*conclusion Drawing and Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles and Hubberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek dalam hal ini mengenai kinerja pemerintah daerah Bulukumba dalam melakukan penataan wilayah yang ada di Kabupaten Bulukumba yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

G. Keabsahan Data

Salah satu teknik paling sulit dan mudah dalam tes keabsahan hasil penelitian ialah dengan melakukan triangulasi. Menurut Sugiyono (2014:127), teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari salah satu teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Sugiyono ada tiga macam triangulasi yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan yang dikatakan umum dengan yang dilakukan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kreadibilitas data dikerjakan dengan teknik mengecek data kepada sumber yang seperti dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau koesioner. Bila dengan cara pengujian kreadibilitas data tersebut, mendapatkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melaksanakan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan teknik melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik yang lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya. Triangulasi juga dapat dikerjakan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi wewenang melakukan pengumpulan data.

H. Jadwal Penelitian

Dalam rencana proposal penelitian perlu pula mencantumkan jadwal pelaksanaan penelitian, yang mencakup:

1. Persiapan

Peneliti akan melakukan penyusunan instrument peneliti.

2. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan peneliti akan melakukan proses pengumpulan data, pengolahan data, klarifikasi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan.

3. Penyelesaian

Peneliti akan melakukan penyusunan laporan penelitian dan perbaikan Skripsi penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Kabupaten Bulukumba

Penamaan Kabupaten Bulukumba menurut cerita bersumber dari 2 kata di dalam bahasa Bugis yaitu Bulu'ku dan Mupa. Dimana jika diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu "masih gunung milik saya". Istilah penamaan ini muncul pada abad ke-17 Masehi, yaitu saat terjadi perang saudara antara Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone.

Bulukumba lahir dari sebuah proses perjuangan yang panjang mengorbankan harta, darah, dengan nyawa. Perlawanan rakyat Bulukumba terhadap Kolonial Jepang dan Belanda menjelang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 di mulai dengan terbentuknya "Barisan Merah Putih" dan "Laskar Brigade Pemberontakan Bulukumba Angkatan Rakyat".

Organisasi yang paling di kenal dalam sejarah perjuangan ini, melahirkan pejuang yang berani mati menerjang badai dan gelombang hanya untuk merebut cita-cita kemerdekaan sebagai bentuk tuntutan hak asasi manusia dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Di lihat dari sisi budaya Bulukumba sudah tampil menjadi sebuah "legenda modern", didalam kancah percaturan kebudayaan Nasional. Bahkan melalui industri budaya dalam bentuk perahu baik itu perahu jenis pinisi, padewakkang, lambo, lepa-lepa, maupun jenis pajala yang telah berhasil mencuatkan nama Bulukumba di dunia Internasional. Kata layar memiliki

pemahaman terhadap adanya subyek yang bernama perahu sebagai suatu refleksi kreativitas masyarakat Bulukumba. Berawal dari peristiwa ekspansi dari 2 kerajaan besar Sulawesi Selatan untuk menaklukkan wilayah bulukumba tersebut, kemudian tercetuslah kalimat di dalam bahasa Bugis "Bulu'kumupa" yang kemudian pada tingkatan dialek tersebut mengalami perubahan proses bunyi yang menjadi "Bulukumba". Sejak dari itu nama Bulukumba sudah ada dan hingga saat ini resmi menjadi sebuah kabupaten.

Peresmian Bulukumba menjadi sebuah nama kabupaten dimulai dari terbentuknya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi yang dilanjutkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 1978, tentang Lambang Daerah.

Akhirnya sesudah dilaksanakan seminar sehari pada tanggal 28 Maret 1994 dengan narasumber Prof. Dr. H. Ahmad Mattulada (ahli sejarah dan budaya), maka diterapkanlah hari jadi Kabupaten Bulukumba, yaitu tanggal 4 Februari 1960 memulai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994. Secara yuridis formal Kabupaten Bulukumba resmi menjadi daerah tingkat II setelah diterapkan Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba oleh DPRD Kabupaten Bulukumba pada tanggal 4 Februari 1960 dan setelah dilaksanakan pelantikan bupati pertama, yakni Andi Patarai pada tanggal 12 Februari 1960.

2. Letak Geografis Kabupaten Bulukumba

Secara wilayah, Kabupaten Bulukumba terdapat pada kondisi 4 dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng – Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas. Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian

selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan industri perahu pinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah. Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,67 Km² dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 Km. Kabupaten Bulukumba memiliki suhu rata-rata berkisar antara 23,82 °C – 27,68 °C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok buat pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Berdasarkan analisis Smith – Ferguson (tipe iklim diukur menurut bulan basah dan bulan kering) maka klasifikasi iklim di Kabupaten Bulukumba termasuk iklim lembap atau agak basah.

Kabupaten Bulukumba berada di sektor timur, musim gadu antara Oktober– Maret dan musim rendengan antara April – September. Terdapat 8 buah stasiun penakar hujan yang tersebar di beberapa kecamatan, yakni: stasiun Bettu, stasiun Bontonyeleng, stasiun Kajang, stasiun Batukaropa, stasiun Tanah Kongkong, stasiun Bontobahari, stasiun Bulo–bulo dan stasiun Herlang.

Daerah dengan curah hujan tertinggi terdapat pada wilayah barat laut dan timur sedangkan pada daerah tengah memiliki curah hujan sedang sedangkan pada bagian selatan curah hujannya rendah. Curah hujan di Kabupaten Bulukumba sebagai berikut: Curah hujan antara 800 – 1000 mm/tahun, meliputi Kecamatan Ujungbulu, sebagian Gantarang, sebagian Ujung Loe dan sebagian besar Bontobahari.

Curah hujan antara 1000 – 1500 mm/tahun, meliputi sebagian Gantarang, sebagian Ujung Loe dan sebagian Bontotiro. Curah hujan antara 1500 – 2000 mm/tahun, meliputi Kecamatan Gantarang, sebagian Rilau Ale, sebagian Ujung

Loe, sebagian Kindang, sebagian Bulukumpa, sebagian Bontotiro, sebagian Herlang dan Kecamatan Kajang. Curah hujan di atas 2000 mm/tahun meliputi Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Herlang.

Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5°20" sampai 5°40" Lintang Selatan dan 119°50" sampai 120°28" Bujur Timur.

Dengan batas-batas wilayah, yaitu :

- a. Sebelah Utara: Kabupaten Sinjai
- b. Sebelah Selatan: Laut Flores
- c. Sebelah Timur: Teluk Bone
- d. Sebelah Barat: Kabupaten Bantaeng

Awal terbentuknya, Kabupaten ini hanya terdiri atas tujuh kecamatan yaitu: Ujungbulu, Gangking, Bulukumpa, Bontobahari, Bonto tiro, Kajang, dan Herlang. Tetapi beberapa kecamatan kemudian mengalami pemekaran dan menjadikan Kabupaten Bulukumba memiliki 10 kecamatan. Ke-10 kecamatan tersebut adalah:

- a. Kecamatan Ujungbulu (Ibukota Kabupaten)
- b. Kecamatan Gantarang
- c. Kecamatan Kindang
- d. Kecamatan Rilau Ale
- e. Kecamatan Bulukumpa
- f. Kecamatan Ujungloe
- g. Kecamatan Bontobahari

- h. Kecamatan Bontotiro
- i. Kecamatan Kajang
- j. Kecamatan Herlang

Dari 10 kecamatan diatas, tujuh di antaranya merupakan daerah pesisir sebagai sentra pengembangan pariwisata dan perikanan yaitu Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang.

Tiga kecamatan lainnya tergolong sentra pengembangan pertanian dan perkebunan, yaitu Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale dan Kecamatan Bulukumpa.

3. Keadaan Demografi

Tabel Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun

2010 – 2014

No	Kecamatan	2010(jiwa)	2011(jiwa)	2012(jiwa)	2013(jiwa)	2014(jiwa)
1	Gantarang	71.158	71.741	72.183	77.276	78.468
2	Ujung Bulu	48.126	48.518	48.818	50.560	49.807
3	Ujung Loe	39.533	39.859	40.105	36.812	45.089
4	Bontobahari	23.976	24.180	24.329	28.294	28.173
5	Bontotiro	22.808	23.004	23.146	27.715	29.724
6	Herlang	24.128	24.332	24.482	31.531	29.724
7	Kajang	47.080	47.467	47.760	53.391	46.880
8	Bulukumpa	50.835	51.252	51.568	53.836	53.415
9	Rilau Ale	37.809	38.121	38.357	42.491	42.539
10	Kindang	29.815	30.057	30.242	31.967	31.850
	Bulukumba	395.268	398.531	400.990	433.873	435.035

Sumber : Profil Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2013, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba

Uraian Penduduk Kecamatan di Kabupaten Bulukumba dari Tahun 2010 - 2014

Kabupaten Bulukumba pada tahun 2014 mempunyai jumlah penduduk mencapai 435.035 jiwa, yang berada di sepuluh (10) Kecamatan dengan kepadatan penduduk 376,76 orang per Km² dengan itu berarti mengalami

peningkatan dari tahun sebelumnya yakni tahun 2013 dengan kepadatan penduduk 375,75 orang per Km.

- a. Kecamatan Gantarang mengalami peningkatan setiap tahunnya yang dimana pada tahun 2010- 2012 jumlah penduduk sebanyak 72. 183 jiwa sedangkan di tahun 2013-2014 mengalami kenaikan drastis secara signifikan dari yang sebelumnya 72. 183 jiwa menjadi 78. 468 jiwa di tahun 2014.
- b. Di Kecamatan Ujung Bulu pada Tahun 2010 jumlah penduduk sebesar 48. 126 jiwa dan mengalami pertumbuhan yang sedikit sampai pada tahun 2013 yaitu berjumlah 48.818 jiwa, dan pada Tahun 2014 mengalami penurunan yang sebelumnya jumlah penduduk sebesar 50. 560 jiwa menjadi 49. 807 jiwa.
- c. Di kecamatan ujung loe pada tahun 2010 – 2012 mengalami kenaikan penduduk hingga 40.105 jiwa dan 2013 mengalami penurunan secara drastis penduduk hingga 36.812 jiwa dan pada tahun 2014 kembali mengalami kenaikan yang secara signifikan hingga mencapai 45.089 jiwa.
- d. Di kecamatan bontobahari pada tahun 2010-2013 setiap tahunnya mengalami kenaikan penduduk hingga 28.294 jiwa dan pada tahun 2014 mengalami penurunan yang sebelumnya 28.294 jiwa menjadi 28.173 jiwa di tahun 2014
- e. Kecamatan Bontotiro pada tahun 2010 jumlah penduduk 22.808 jiwa dan mengalami kenaikan yang sedikit sampai pada tahun 2012 tetapi 2013 sampai 2014 mengalami kenaikan drastis hingga berjumlah 29.724 jiwa.
- f. Kecamatan Herlang pada tahun 2010 hingga 2012 sedikit mengalami kenaikan penduduk mencapai 24.482 jiwa, sedangkan pada tahun 2013 mengalami kenaikan yang signifikan hingga 31.531 jiwa tetapi pada tahun 2014

berbanding terbalik karena mengalami penurunan hingga jumlah penduduk turun menjadi 29.724 jiwa.

- g. Kecamatan Kajang pada tahun 2010 jumlah penduduk 47.080 jiwa dan mengalami kenaikan sedikit di setiap tahunnya hingga 2012 mencapai 47.760 jiwa sedangkan di tahun 2013 mengalami kenaikan penduduk yang signifikan hingga mencapai 53.391 jiwa dan di tahun 2014 kembali mengalami penurunan penduduk yang sangat drastis hingga 46.880 jiwa.
- h. Kecamatan Bulukumpa pada tahun 2010 – 2012 setiap tahunnya mengalami kenaikan jumlah penduduk hingga 51.568 jiwa dan di tahun 2013 kembali kenaikan jumlah penduduk hingga 53.836 jiwa sedangkan tahun 2014 kembali mengalami penurunan hingga jumlah penduduk mencapai 53.415 jiwa.
- i. Kecamatan Rilau Ale pada tahun 2010 jumlah penduduk 37.809 jiwa dan pada tahun 2011 – 2012 mengalami kenaikan penduduk mencapai 38.357 jiwa sedangkan pada tahun 2013 – 2014 kembali mengalami kenaikan yang signifikan hingga penduduk mencapai 42.535 jiwa.
- j. Kecamatan Kindang pada tahun 2010 – 2012 mengalami kenaikan sedikit hingga jumlah penduduk mencapai 30.242 jiwa dan di tahun 2013 kembali mengalami kenaikan jumlah penduduk menjadi 31.967 jiwa sedangkan 2014 kembali mengalami penurunan hingga jumlah penduduk 31.850 jiwa.

Tabel Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2010 – 2014

Adapun tabel penduduk jenis kelamin dan rasio jenis kelamin sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)		
1	GANTARANG	39.648	38.820	78.468	102,13
2	UJUNGBULU	24.975	24.832	49.807	100,58
3	UJUNG LOE	22.472	22.617	45.089	99,36
4	BONTOBAHARI	14.003	14.170	28.173	98,82
5	BONTOTIRO	14.347	14.743	29.090	97,31
6	HERLANG	14.718	15.006	29.724	98,08
7	KAJANG	23.628	23.252	46.880	101,62
8	BULUKUMPA	26.521	26.894	53.415	98,61
9	RILAU ALE	21.054	21.485	42.539	97,99
10	KINDANG	16.149	15.701	31.850	102,85
BLK	2010	186.890	208.378	395.268	90
	2011	187.439	211.092	398.531	89
	2012	188.597	212.393	400.990	89
	2013	209.036	224.837	433.873	92
	2014	217.515	217.520	435.035	100.00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2014.

Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, pada tahun 2014 perbandingan jenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan jenis kelamin laki-laki, yakni 217.520 jiwa perempuan dibandingkan penduduk laki-laki yakni 217.515 jiwa. Rasio jenis kelamin antara

perempuan dan laki-laki yakni 100, berarti dalam 100 orang penduduk laki-laki terdapat 100 orang penduduk perempuan.

B. Profil Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba

Bidang penataan ruang dipimpin oleh seorang kepala bidang mempunyai tugas pokok, membantu kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan penyiapan perumusan dan penyelenggaraan penataan ruang, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, uraian tugas kepala bidang penataan ruang ialah sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan bidang penataan ruang.
- b. Menyediakan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, bidang penataan ruang daerah.
- c. Menyediakan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, penataan ruang wilayah Kabupaten dan kawasan strategis Kabupaten.
- d. Menyediakan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.
- e. Menyediakan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang dan kerjasama penataan ruang antar kabupaten serta fasilitasi penataan ruang dan kerjasama antar desa.
- f. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat

kabupaten dan kawasan strategis kabupaten, termasuk wilayah lintas kabupaten atau kota.

- g. Melaksanakan koordinasi dan operasionalisasi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) penataan ruang ditingkat Kabupaten.
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya

1. Visi Dan Misi Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba

a. Visi

Mewujudkan Pembangunan Dan Peningkatan Infrastruktur Jalan Yang Mantap Dalam Upaya Mendorong Terbentuknya Masyarakat Sejahtera Dan Mandiri.

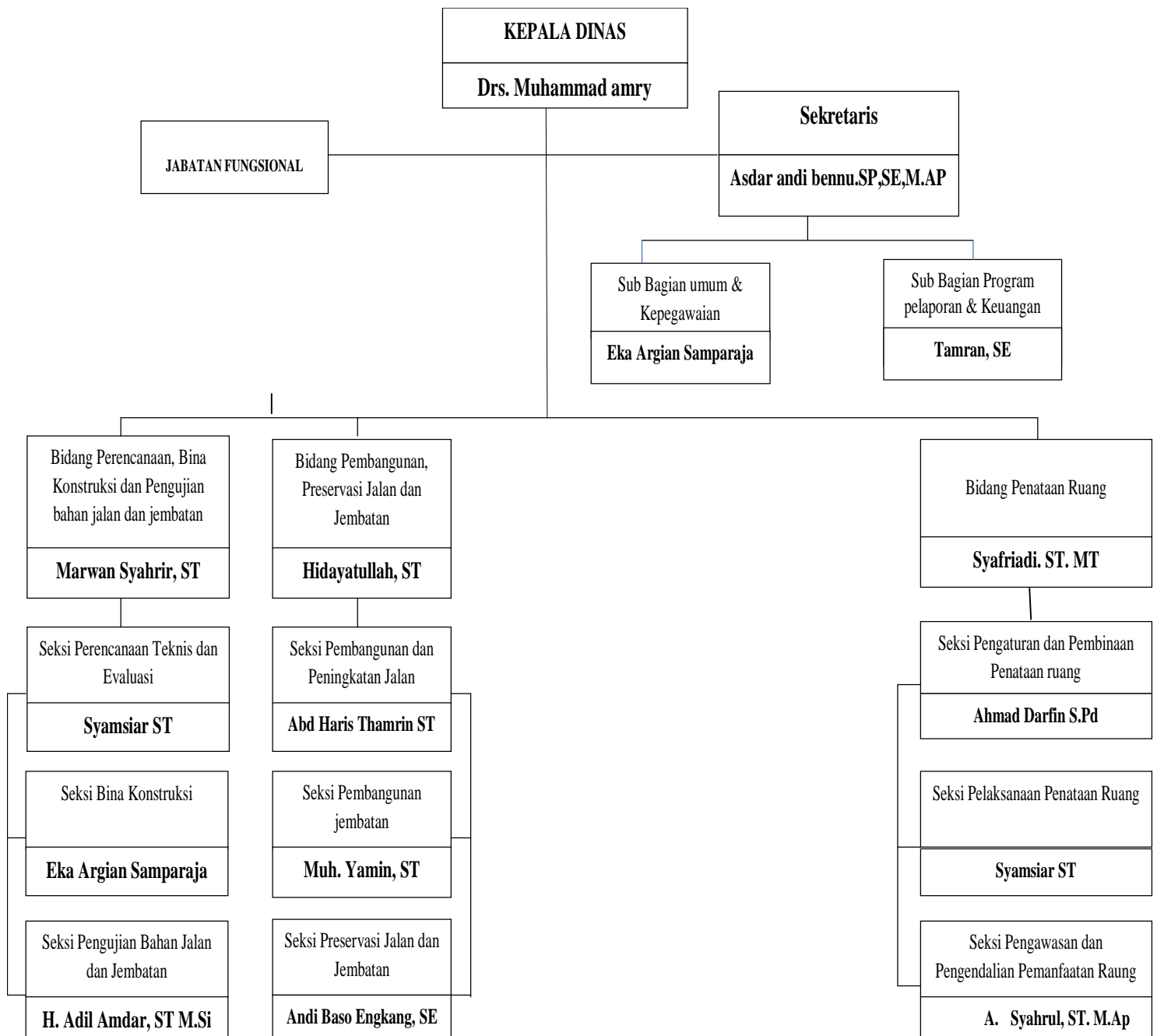
b. Misi

- 1) Menyusun Perencanaan Jalan Dan Jembatan Yang Berkualitas Sesuai Standar Kementerian Pekerjaan Umum RI
- 2) Meningkatkan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dan Jembatan Untuk Mendukung Pembangunan Wilayah Strategi
- 3) Mengamankan Serta Memelihara Jalan Dan Jembatan Yang Senantiasa Berada Dalam Kondisi Mantap
- 4) Mendorong Perkembangan Jiwa Kostruktif Yang Kompetiti
- 5) Menerapkan Organisasi Yang Efisien, Tata Laksana Yang Efektif Dan Terpadu Dengan Prinsip Good Governance Serta Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Profesional

- 6) Mengembangkan Kerjasama Yang Lebih Terpadu Dengan Skpd Lain Yang Terkait Dengan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas.

2. Gambar Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba

Adapun gambar struktur organisasi dinas tata ruang kabupaten bulukumba sebagai berikut:



Tugas Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba

1. Kepala Dinas memiliki tugas pokok membantu Bupati melakukan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
2. sekretaris memiliki tugas pokok membantu Kepala Dinas didalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan Dinas.
3. Sub bagian umum dan kepegawaian melakukan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan, menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian, menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas, Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai, melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) memulai program Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan pelatihan, melakukan pemeliharaan / perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya, menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perengkapan/asset, melaksanakan pembinaan staf, melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

4. Sub Bagian program pelaporan dan keuangan

a. pelaporan

melakukan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja, melakukan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melaksanakan sosialisasi program di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggung jawaban dan laporan kinerja, melaksanakan penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM), menyiapkan rencana umum pengadaan, membuat rencana kerja tahunan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

b. Keuangan

menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melakukan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan beserta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas, mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan,

mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan, membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait tugasnya.

5. Bidang perencanaan dan konstruksi, pengujian jembatan dan jalan

melakukan pembinaan bidang pengembangan administrasi, pembinaan bidang pengembangan kualitas konstruksi dan analisis dampak lingkungan konstruksi, melaksanakan pembinaan bidang pengadaan jasa konstruksi, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan atas jasa konstruksi yang baru berlaku, melakukan bantuan teknis dalam bentuk penyuluhan/sosialisasi standar teknis dan peraturan teknis yang berhubungan dengan konstruksi ke-PU an, menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan, melakukan tugas yang lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

6. Bidang pembangunan, preservasi jalan dan jembatan

Bidang Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Bidang Jalan Dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan dinas dalam bidang jalan dan jembatan serta pengembangannya yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

7. Bidang penataan ruang

Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala bidang Penataan Ruang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang Penataan Ruang yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

8. Seksi perencanaan teknis dan evaluasi

Seksi Perencanaan teknis dan evaluasi mempunyai tugas pokok menyusun, mengonsep, menganalisis dan menyiapkan bahan untuk menyusun perencanaan teknis dan pengawasan, serta pengumpulan data dan jembatan.

9. Seksi pembangunan dan peningkatan jalan

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembangunan dan meningkatkan jalan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, beserta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

10. Seksi pengaturan dan pembinaan penataan ruang

Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja di bidang pengaturan, pembinaan penataan ruang, sosialisasi, kerjasama, dan pelayanan umum yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang, pembinaan dan informasi berkaitan pelayanan perizinan pemanfaatan ruang, Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pengaturan, pembinaan penataan ruang, sosialisasi, kerjasama, dan pelayanan umum berkaitan dengan perencanaan tata ruang, pembinaan dan informasi berkaitan pelayanan perizinan pemanfaatan ruang, Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja di bidang pengaturan, pembinaan penataan ruang, sosialisasi, kerjasama, dan

elayanan umum berkaitan dengan perencanaan tata ruang, pembinaan dan informasi berkaitan pelayanan perizinan pemanfaatan ruang, Melaksanakan tugas di bidang pengaturan, pembinaan penataan ruang, sosialisasi, kerjasama, dan pelayanan umum berkaitan dengan perencanaan tata ruang, pembinaan dan informasi berkaitan pelayanan perizinan pemanfaatan ruang sesuai rencana kerja, Melakukan pengawasan dan pengendalian di bidang pengaturan, pembinaan penataan ruang, sosialisasi, kerjasama, dan pelayanan umum berkaitan dengan perencanaan tata ruang, pembinaan dan informasi berkaitan pelayanan perizinan pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundang-undangan, Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di bidang pengaturan, pembinaan penataan ruang, sosialisasi, kerjasama, dan pelayanan umum berkaitan dengan perencanaan tata ruang, pembinaan dan informasi berkaitan pelayanan perizinan pemanfaatan ruang sesuai dengan lingkup tugasnya, Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan kepada pimpinan sesuai dengan di bidang tugasnya.

11. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

pemanfaatan ruang di bidang tata ruang. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi yang memiliki tugas pokok membantu Kepala Bidang Tata Ruang dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

12. Seksi pelaksanaan penataan ruang

menyusun rencana kerja Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang, menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang, melakukan penyusunan, penetapan, dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten, memproses perumusan kebijakan strategis operasional Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten dan Kawasan Strategis kabupaten, melakukan penyusunan dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang, pembiayaan program, dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan Kawasan Strategis kabupaten, menyusun standar pelayanan minimum bidang penataan ruang di tingkat kabupaten, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

13. Seksi pembangunan jembatan

Menyelenggarakan program pembangunan, peningkatan perencanaan teknis, pengawasan, pemeliharaan dan perbaikan serta pelaksanaan pengendalian konstruksi pengoprasian jembatan kabupaten dalam arti melakukan penyusunan perencanaan teknis pembangunan jembatan kabupaten.

14. Seksi preservasi jalan dan jembatan

Menyusun pedoman operasional penyelenggaraan jalan Kabupaten, menetapkan status jalan Kabupaten, menyusun perencanaan umum dan

pembiayaan jaringan jalan kabupaten, merumuskan penyelenggaraan jalan kabupaten .

15. Seksi pengujian bahan jalan dan jembatan

Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peralatan, melaksanakan pengujian dan pengendalian standar mutu, melakukan tugas-tugas yang lain diberikan atasan.

16. Seksi bina konstruksi

Menyusun program perencanaan teknis kegiatan bina jasa konstruksi, Mengarahkan pelaksanaan kegiatan bina jasa konstruksi, Mengatur kegiatan kegiatan bina jasa konstruksi, Melaksanakan bimbingan teknis kegiatan bina jasa konstruksi, Mengevaluasi program kegiatan bina jasa konstruksi, Melaksanakan kegiatan tanggap darurat di bidang bina jasa konstruksi, Menganalisa dan mengembangkan kinerja bidang, Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Dinas, Melaporkan kegiatan bidang kepada kepala dinas.

3. Daftar Nama Pegawai Dan Golongan Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba.

Adapun tabel daftar nama pegawai dan golongan Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

No.	NAMA / JABATAN / NIP	PANGKAT / GOL
1	Drs. Muhammad Amry / KEPALA DINAS NIP. 196504141993031013	Pembina Utama Muda - IV/c
2	Asdar Andi Benu SP, SE, M.Ap / SEKRETARIS NIP. 197108151998031006	Pembina Tk. I - IV/b
3	Syafriadi ST. MT / KABID. Penataan Ruang NIP. 197108042003121003	Penata Tk. I - III/d
4	Marwan Syahrir ST / KABID. Perencanaan Bina Konstruksi dan pengujian bahan jalan/jembatan NIP. 1975060120050201004	Penata Tk. I - III/d
5	Hidayatullah ST / KABID. Pembangunan, Preservasi Jalan dan Jembatan NIP. 197710142002121006	Penata Tk. I - III/d
6	TAMRAN, SE / KASUBAG. Program dan Keuangan NIP. 197205011992031004	Penata TK. I - III/d
7	EKA ARGIAN SAMPARAJA / KASUBAG. Umum dan Kepegawaian – Bina Jasa Konstruksi NIP. 198001162010011006	Penata III/c
8	ABDUL HARIS THAMRIN, ST / KASI. Pembangunan dan Peningkatan Jalan NIP. 197012192007011014	Penata III/c
9	AHMAD DARFIN, S.Pd / KASI. Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang NIP. 196810301987031002	Penata Tk. I - III/d
10	MUHAMMAD YAMIN, ST / KASI. Pembangunan dan Peningkatan Jembatan NIP. 197606092005021004	Penata Tk. I - III/d
11	A. BASO ENKANG, SE / KASI. Preservasi dan Peralatan NIP. 197111251994031011	Penata Tk. I - III/d
12	H. ADIL AMDAR, ST. M.Si / KASI. Pengujian Bahan Jalan dan Jembatan NIP. 196805012008011010	Penata - III/c

13	A. SYAHRUL, ST. M.Ap /KASI. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang NIP. 197601112008011007	Penata - III/c
14	SYAMSIAR, ST/ KASI. Perencanaan dan Teknik Evaluasi – KASI. Pelaksanaan dan Penataan Ruang NIP. 197601312008012007	Penata - III/c
15	HJ. NUR LAELA, SE/ STAF NIP. 196408201991032008	Penata Tk. I - III/d
16	SYAHRUL ALAM, ST / STAF NIP. 196909292006041009	Penata Tk. I - III/d
17	MUHLIS MUSTAFA, ST / STAF NIP. 197712082005021005	Penata Tk. I - III/d
18	KARMILA RAUF, ST / STAF NIP. 197401212006042015	Penata Tk. I - III/d
19	MAWARWATI, SE / STAF NIP. 197801032007012008	Penata III/c
20	AHMAD DASI,S.Sos / STAF NIP. 1970080011992031009	Penata III/c
21	ADE SRI WAHYUNI, ST / STAF NIP. 197711132009012005	Penata - III/c
22	JUMARDIN, ST / STAF NIP. 197408172009011006	Penata - III/c
23	RISAL ADNAN, ST / STAF NIP. 198303132011011009	Penata Muda Tk. I - III/b
24	HAMIRAH, SE/ STAF NIP. 196903052007012025	Penata Muda Tk. I - III/b
25	ROSTINA, SE / STAF NIP. 197505022007012031	Penata Muda Tk. I - III/b
26	YETTI ANDRIANI Z, SE / STAF NIP. 197702122007012012	Penata Muda Tk. I - III/b
27	SULTAN SYAHRIR, SE/ STAF NIP. 198110102006041013	Penata Muda Tk. I - III/b
28	ASRUL MUBARAK, SE / STAF NIP. 198003102009021002	Penata Muda Tk. I - III/b
29	SYAMSIR, S.Sos / STAF NIP. 196503251988031012	Penata Muda Tk. I - III/b
30	SYAMSU/ STAF NIP. 196403031983111001	Penata Muda III/a
31	HJ. MUSFINA BASO, ST/ STAF NIP. 197001022009012002	Penata Muda - III/a
32	ABDUL WAHIDIN A.Md/ STAF	Penata Muda III/ a

	NIP. 197708072006041007	
33	MUHAMMAD IDRIS / STAF NIP. 196111092007011011	Pengatur - II/c
34	MUHAMMAD SYAHRUL EFENDI / STAF NIP. 197201032008011007	Pengatur - II/c
35	MUHAMMAD ANSHARI A / STAF NIP. 196907312007011019	Pengatur - II/c
36	JOHAN / STAF NIP. 197208102008011020	Pengatur - II/c
37	Kawe / STAF NIP. 197212282008011007	Juru I/c

Sumber : Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba

C. Pembahasan kinerja pemerintah dalam pelaksanaan rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Bulukumba

1. Kualitas

Kualitas ialah salah satu indikator dalam mengukur kinerja Pemerintah Dinas Tata Ruang Kecamatan Ujung bulu Kabupaten Bulukumba. Kualitas yang dimaksud yaitu tingkat hasil aktivitas yang dikerjakan para Dinas Tata Ruang dalam melaksanakan programnya.

Kualitas kerja Dinas Tata Ruang Kecamatan Ujung bulu Kabupaten Bulukumba dapat diukur dari tercapainya tugas pokok dan fungsi yang emban Dinas Tata Ruang Kecamatan Ujung bulu Kabupaten Bulukumba yaitu 1) menyusun perencanaan jalan dan jembatan yang berkualitas sesuai standar kementerian pekerjaan umum RI; 2) meningkatkan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan untuk mendukung pembangunan wilayah strategi; 3) mengamankan serta memelihara jalan dan jembatan yang senagtiasa berada dalam kondisi mantap; 4) mendorong perkembangan jiwa konstruktif yang

kompetitif; 5) menerapkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan terpadu dengan prinsip good governance serta mengembangkan sumber daya manusia yang profesional; dan 6) mengembangkan kerjasama yang lebih terpadu dengan skpd lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dinas.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, Sasaran Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut: 1) Terwujudnya perencanaan penyelenggaraan ruang yang sesuai dengan kebijakan umum ruang daerah; 2) Terwujudnya pengendalian dan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kebijakan umum ruang daerah; 3) Terwujudnya pengawasan bangunan yang sesuai dengan pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Sasaran yang ingin dicapai.

Indikator Kinerja Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba, untuk pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja yaitu:

1. Jumlah kecamatan yang telah memiliki rencana detail/ teknis tata ruang, penjabaran dari RTRW Kabupaten Bulukumba
2. Jumlah kecamatan yang telah memiliki Zoning Regulation penjabaran dari RDTR dan RTRW (Non Kumulatif)
3. Penetapan Perda RDTR (SPM)
4. Jumlah Kelurahan yang telah memiliki RTBL (non kumulatif)
5. Jumlah Kelurahan yang telah memiliki perencanaan kawasan kumuh

6. Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan luas Wilayah ber HPL/HGB(termasuk luasan hutan lindung/konservasi)
7. Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan Wilayah ber HPL/HGB(tanpa luasan hutan lindung/konservasi)
8. Rasio Permukiman Layak Huni Kabupaten Bulukumba
9. Persentase Ketaatan terhadap RT RW
10. Pasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan
11. Jumlah kelurahan yang telah terpasang plat nomor rumah huni (non kumulatif)
12. Persentase pelanggaran aktifitas IMB yang telah di tindak lanjuti
13. Persentase pelanggaran aktifitas pembangunan yang tidak memiliki IMB yang telah ditindak lanjuti.

Dari tiga belas indikator utama Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah kecamatan yang telah memiliki rencana detail/teknis tata ruang, penjabaran dari RTRW Kabupaten Bulukumba sebanyak 10 kecamatan sudah atau sudah tersedia 100%.
2. Jumlah kecamatan yang telah memiliki Zoning Regulation penjabaran dari RDTR dan RTRW (Non Kumulatif) di Kabupaten Bulukumba sebanyak 10 kecamatan sudah atau sudah tersedia 100%.
3. Penetapan Perda RDTR (SPM) Sementara dalam proses penyusunan draf dan menunggu pengesahan dari DPRD. Atau tersedi 75%.
4. Jumlah Kelurahan yang telah memiliki RTBL Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) sebanyak 100%.

5. Jumlah Kelurahan yang telah memiliki perencanaan kawasan kumuh sebanyak 100%.
6. Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan luas Wilayah ber HPL/HGB tersedia
7. Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan Wilayah ber HPL/HGB tersedian.
8. Rasio Permukiman Layak Huni Kabupaten Bulukumba 95%
9. Persentase Ketaatan terhadap RTRW 100%.
10. Bangunan ber-IMB per satuan bangunan 90%
11. Kelurahan yang telah terpasang plat nomor rumah huni 100%
12. Persentase pelanggaran aktifitas IMB yang telah di tindak lanjuti sebanyak 85%.
13. Persentase pelanggaran aktifitas pembangunan yang tidak memiliki IMB yang telah ditindak lanjuti sebanyak 80%.

Berdasarkan hasil analisis dokumen di Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba, dapat dijelaskan bahwa Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba untuk memperoleh kinerja yang berkualitas dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan :
 - a. Melakukan perbaikan terhadap implementasi Renstra agar Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.
 - b. Melakukan perbaikan pemenuhan dokumen perencanaan kinerja tahunan (RKT) AGAR indikator kinerja sasaran dan target kinerja

tahunan dalam dokumen RKT memenuhi kriteria yang Baik dan mengacu pada review Renstra yang telah dibuat.

- c. Melakukan perbaikan implementasi dokumen Rencana Kerja Tahunan agar:
 - a) Target kinerja yang diperjanjikan dipergunakan untuk mengukur keberhasilan.
 - b) Penetapan kinerja dimonitor pencapaiannya secara berkala dijadikan dasar untuk mengukur dan menyimpulkan keberhasilan maupun kegagalan serta dijadikan dasar pemberian reward and punishment.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Melakukan pemenuhan pengukuran terhadap IKU agar mekanisme pengumpulan data kinerja Yang didukung SOP sehingga realisasi data kinerja dapat diyakini validitasnya.
- b. Melakukan perbaikan kualitas pengukuran terhadap indikator kinerja utama.
- c. Melakukan perbaikan implementasi pengukuran terhadap indikator kinerja utama.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Melakukan perbaikan penyajian informasi kinerja agar LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan) menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome, menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan, serta menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja sesuai Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditetapkan.

- b. Melakukan perbaikan dalam rangka pemanfaatan informasi kinerja agar:
 - a) Informasi yang disajikan dalam LAKIP dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan tidak hanya sebatas pelaporan saja. Informasi yang disajikan hendaknya dapat menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program secara terukur, sehingga dapat digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.
 - c) Informasi dalam LAKIP digunakan untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik periode berikutnya.

4. Evaluasi Internal

Evaluasi internal dilakukan untuk menjawab atau menyimpulkan posisi capaian kinerja terakhir dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi hambatan pencapaian kinerja yang dilakukan tidak hanya sebatas pelaksanaan program dan kegiatan serta penyerapan anggaran, tetapi juga dapat memberikan simpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi dan terdapat bukti yang cukup rekomendasi telah ditindaklanjuti. Lebih lanjut, evaluasi program yang dilakukan dapat memberikan informasi yang memadai atas tindak lanjut rekomendasi yang pernah disarankan melalui supervisi yang dilaksanakan secara terstruktur. Dari hasil evaluasi program dapat diketahui keberhasilan program yang memberikan simpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi dan terdapat bukti yang cukup bahwa rekomendasi telah ditindaklanjuti, tidak hanya sebatas pelaksanaan program dan kegiatan serta penyerapan anggaran. Evaluasi internal dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan perbaikan terhadap pemenuhan evaluasi internal
- b. Melakukan perbaikan terhadap kualitas evaluasi internal

Sebab kualitas dalam hal kinerja, memang selalu memprioritaskan apa yang kemudian menjadi tujuan bersama, sehingga untuk mencapai tujuan itu kinerja-kinerja yang di lakukan harus selesai secara maksimal. Yang mana melibatkan pihak-pihak yang diberi tanggung jawab, tokoh masyarakat, dan beberapa ahli dibidang perencanaan tata ruang. Selain didalam mengerjakan suatu pekerjaan juga menyiapkan anggaran agar pencapaian kualitas kinerja yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan.

Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengukur kualitas suatu kinerja birokrasi. Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan, peneliti memperoleh gambaran tentang kualitas rencana tata ruang yang dilakukan oleh pihak Dinas Tata Ruang antara lain :

Hasil wawancara bersama MA selaku Kepala Dinas Tata Ruang memberikan pernyataan tentang kualitas kinerja Dinas Tata Ruang, beliau mengatakan :

“Pada capaian kualitas kinerja yang kami lakukan sebenarnya bisa dibilang telah memenuhi kualitas sebab dalam hal kinerja, kami memang selalu memprioritaskan apa yang kemudian menjadi tujuan bersama, sehingga untuk mencapai tujuan itu kinerja-kinerja yang kami lakukan selalu total. Melibatkan pihak-pihak yang diberi tanggung jawab, tokoh masyarakat, dan beberapa ahli dibidang perencanaan tata ruang. Selain itu kami juga menyiapkan anggaran untuk memberikan fasilitas yang terbaik, berkualitas dan ramah terhadap lingkungan. Apalagi semangat yang dibangun dalam Kantor kami ialah kerja kolektif.” (Wawancara MA ,22 oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba maka dapat dikatakan bahwa kualitas kinerja telah tercapai. Pencapaian kualitas kinerja ini dicapai dengan cara membangun budaya kerja gotong royong di Dinas Tata Ruang dengan memberikan tugas kepada masing-masing orang yang bertanggung jawab dibidang dan ahlinya untuk mencapai tujuan bersama.

Lanjut hasil wawancara bersama SF Selaku Kepala Bidang Penataan ruang mengemukakan tentang kualitas pegawai/karyawan yang oleh pihak dinas tata ruang di kecamatan ujungbulu kabupaten bulukumba, beliau mengatakan bahwa :

“Kami di dinas tata ruang kabupaten bulukumba apabila dilihat dari jenjang pendidikan yang dimiliki pegawai itu sudah sesuai dengan tanggung jawab yang diamanahkan kepada mereka karena hampir semua pegawai itu sudah maksimal dalam mengerjakan suatu pekerjaan dan apabila di mendapatkan tugas dapat di selesaikan dengan baik sesuai dengan prosedur” (Wawancara SF,22 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas maka dapat di simpulkan bahwa jenjang pendidikan yang dimiliki pegawai dinas tata ruang sudah sesuai dengan kualitas kinerja dilihat dari jenjang pendidikan yang dimiliki pegawai hampir semua pegawai telah menempuh pendidikan dipeguruan tinggi .

Tidak jauh berbeda dengan informan AD kepala seksi pelaksanaan dan penataan ruang yang mengatakan bahwa:

”sudah menjadi tangun jawab kami atas segala pekerjaan yang ada dan harus diselesaikan dengan segera mungkin tanpa pendidikan yang mumpuni dan pelatihan yang baik tidak mungkin akan selesai dengan baik.”(wawancara AD ,22 Oktober 2018)

Hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa kualitas kinerja dinas tata ruang itu sudah sesuai dengan prosedur karena dilihat dari hasil kerja dan usaha para pegawai dan serta usaha pemerintah dinas yang mengadakan pelatihan.

Hasil wawancara dengan informan AS selaku kepala seksi pengendalian dan pemanfaatan ruang sebagai berikut.

“ hasil kerja menurut saya semua sudah berjalan dengan baik jika ada komplek dari masyarakat kami sigap dalam menyelesaikan permasalahan tersebut saya rasa kalau kita berbicara masalah komitmen kerja yah berjalan dengan sangat baik”(wawancara AS ,22 oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat di simpulkan bahwa hasil kerja yang dimiliki oleh dinas tata ruang sudah berjalan sebagai manajemennya dan kualitas pegawai sudah sesuai dengan teori yang ada. .

Dari hasil analisis wawancara dengan informan dengan mendengarkan serta menganalisa penulis dapat menyimpulkan Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk membangun dan menata wilayah yang nyaman, ramah terhadap lingkungan pada umumnya.

Serta pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus sesuai dengan SOP yang telah ditentukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam melakukan tugas dan fungsi pegawai tersebut serta selalu mengedepankan hasil kualitas kinerja yang baik. Hal ini terbukti dari informan yang mengatakan dalam perekrutan pegawai pun tidak dilakukan dengan sembarangan melainkan dengan perencanaan yang tepat serta sumberdaya manusia yang digunakan juga sumberdaya manusia yang mempunyai dengan seluruh pegawai bertitel pendidikan sarjana dan ada beberapa bagian yang sudah berpredikat agar menghasilkan kerja yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh kemudian diperkuat dengan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas kerja Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba sudah berada pada kategori baik, karena rata-rata capaian sasaran dan indikator kinerja utama sudah mencapai rata-rata 97% dengan setiap program yang dilaksanakan diawali dengan perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal. Lebih lanjut, kualitas kerja Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba telah menjalankan dengan baik tugas dan fungsinya dalam mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bulukumba. Kualitas kerja Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba juga dilihat dari rendahnya pelanggaran dalam mendirikan bangunan karena telah membentuk tim pengawasan dan pengendalian yang bertugas memberi pengarahan dan pengawasan terhadap pembangunan serta penerapan sanksi administrasi pelanggaran pemanfaatan ruang.

2. Kuantitas

Kuantitas adalah cara mengukur kinerja para pegawai mengenai skill yang dimilikinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam suatu instansi pemerintah tanpa skill yang dimiliki para setiap pegawai tidak akan mampu menyelesaikan tugas yang diberikan. Administrasi negara haruslah mampu menjawab tuntutan masyarakat yang senantiasa berkembang tersebut, sehingga ketidakpuasan masyarakat dapat diperkecil dan dipersempit jaraknya.

Berhubungan dengan tingkat kebenaran atau keberhasilan dan kesalahan bahwa untuk menentukan tingkat kualitas keberhasilan seseorang, kelompok,

organisasi bahkan sampai kepada negara kita harus melaksanakan perbandingan antara kebenaran atau ketepatan dengan kekeliruan atau yang dilakukan.

Semakin rendah tingkat kekeliruan atau kesalahan yang terjadi, tentunya akan semakin mendekati ketepatan dalam pelaksanaan setiap aktivitas atau pekerjaan (tugas) yang dibebankan setiap kelompok birokrasi. Ketepatan berpikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal. Dalam mengukur membentuk skil para pegawai dalam melakukan kerja yang telah di embangnya dalam menjalankan tugas.

Berdasarkan tabel ketentuan tata bangunan diperoleh bahwa jumlah jalan yang ada di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba sebanyak 117 Jalan yang terdiri atas 10 kolektor primer K1 dan 107 jalan Lokal Primer. Dari 117 jalan tersebut mempunyai panjang 96,228 Km (96.228.000 Meter) dengan jumlah bangunan sebanyak 9627 Bangunan. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan tata bangunan, 9.627 bangunan tersebut dapat dijelasakn sebagai berikut:

a. Garis sempadan bangunan

Dari 9.627 bangunan yang ada di di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, terdapat 9.248 (96,06%) bangunan yang memenuhi kriteria Garis sempadan bangunanketentuan tata bangunan dan 454 (4,72%) yang tidak memenuhi kriteria ketentuan tata bangunan. Ketentuan tata bangunan yang berkaitan dengan garis sempadan bangunan belum mencapai target sebanyak 100%, atau hanya 96,06% dan masih ada 4,72% bangunan yang tidak memenuhi kriteria ketentuan tata bangunan garis sempadan

bangunan. Hal tersebut terjadi, karena banyak masyarakat yang membuat bangunan terlebih dahulu kemudian baru mengurus surat izin mendirikan bangunan, sehingga bangunan yang dibuat tidak memenuhi kriteria ketentuan tata bangunan garis sempadan bangunan.

b. Garis sempadan jalan

Dari 9.627 bangunan yang ada di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, terdapat 9.345 (97,07%) bangunan yang memenuhi kriteria Garis sempadan jalan ketentuan tata bangunan dan 367 (3,81%) yang tidak memenuhi kriteria Garis sempadan jalan ketentuan tata bangunan. Ketentuan tata bangunan yang berkaitan dengan garis sempadan jalan belum mencapai target sebanyak 100%, atau hanya 97,07% dan masih ada 3,81% bangunan yang tidak memenuhi kriteria ketentuan tata bangunan garis sempadan jalan. Hal tersebut terjadi, karena banyak masyarakat yang membuat bangunan terlebih dahulu kemudian baru mengurus surat izin mendirikan bangunan, sehingga bangunan yang dibuat tidak memenuhi kriteria ketentuan tata bangunan garis sempadan jalan. Faktor lain yang menyebabkan adanya bangunan yang tidak memenuhi kriteria garis sempadan jalan karena adanya bangunan lama yang sudah dibangun puluhan tahun yang lalu yang tidak memenuhi kriteria.

c. Ketinggian Bangunan

Dari 9.627 bangunan yang ada di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba semuanya memenuhi kriteria ketinggian bangunan ketentuan tata bangunan. Hal tersebut terjadi Karena Dinas Tata Ruang Kabupaten

Bulukumba tidak memberi Izin mendirikan bangunan bagi yang akan bangun melewati batas ketinggian bangunan sebagaimana yang tertuang dalam Ketentuan Tata Bangunan Kabupaten Bulukumba Pasal 46 ayat 2 yaitu ketentuan maksimal tinggi bangunan yaitu 17 meter atau paling tinggi 4 Lantai. Ketentuan tata bangunan yang berkaitan dengan ketinggian bangunan sudah mencapai target sebanyak 100%, hal tersebut tercapai karena orang atau perusahaan yang akan membangun bangunan tinggi itu terbatas, hanya pada level perusahaan saja seperti penginapan dan perkantoran.

d. Amplop Bangunan

Dari 9.627 bangunan yang ada di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba semuanya memenuhi kriteria amplop bangunan ketentuan tata bangunan. Hal tersebut terjadi Karena Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba tidak memberi Izin mendirikan bangunan bagi yang akan membangun dan tidak sesuai dengan ketentuan amplop bangunan tata bangunan Kabupaten Bulukumba sebagaimana yang tertuang dalam Ketentuan Tata Bangunan Kabupaten Bulukumba Pasal 46 ayat 2 yaitu ketentuan tampilan bangunan pada kawasan khusus perkantoran, peribadatan dan sarana pelayanan umum harus mengakomodasi tampilan nilai arsitektur lokal Kabupaten Bulukumba. Ketentuan tata bangunan yang berkaitan dengan amplop sudah mencapai target sebanyak 100%, hal tersebut tercapai karena bangunan yang harus memenuhi kriteria aplop

bangunan terbatas dan jumlahnya relatif sedikit seperti mesjid, sekolah, perkantoran, dan kantor pelayanan umum lainnya.

Adapun hasil wawancara bersama MA selaku kepala dinas tata ruang sebagai berikut :

“ tentu ada pelatihan yang didapatkan oleh para pegawai misalkan saja sebelum dilantik jadi aparatur pegawai negeri sipil tentu melewati tahapan proses pelatihan dalam pra jabatan atau diklat dalam pelantikannya. Dan masih banyak lagi proses pembelajaran yang harus dilalui ketika melakukan kerjanya sehingga sering kali mereka menyelesaikan tugas dan fungsinya secara otodidag. Mereka harus melakukan kerja dengan akuntabel transparan dan bertanggung jawab saya rasa embang tanggung jawab yang ada dalam diri mereka bisa menjadikan pegawai pelayanan pablik yang cerdas dan berkualitas”(wawancara 22 oktober 2018)

Dari hasil penjelasan dari wawancara dengan kepala dinas tata ruang memang selayaknya para pegawai sudah mestinya harus mengedepankan tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat Dalam menjalankan tugas agar berjalan dengan efektif harus pula memperhatikan sumber daya manusia yang cukup atau mempuni dan professional dalam bidangnya berdasarkan hasil wawancara dengan informan.

Wawancara dengan informan SF selaku kepala bidang tata ruang sebagai berikut.

“Kalau kita berbicara mengenai fasilitas yang digunakan tentunya sudah sangat memadai yah, semua sudah didukun dengan teknologi yang ada di jaman modern ini misalkan saja contoh kecilya adalah gambar dulunya gambar dilakukan dengan manual, dan sekarang dilakukan dengan teknologi yang ada misalkan mengambar dengan aplikasi auto cat dan lain sebagainya yang jelasnya sekarang sudah menggunakan komputerisasi dalam menjalankan tugas atau kerja”(wawancara SF, 22 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simak bersama dari indikator kuantitas sudah berjalan dengan baik dalam ruang lingkup dinas tata ruang dan bangunan serta para pegawai juga sudah sangat baik dalam menyadari tugas dan fungsinya. Maka dapat di tarik kesimpulan bahwa SOP sudah dijalankan dengan baik oleh para pegawai dengan didukungnya fasilitas yang sudah memadai untuk melakukan kerja tanpa fasilitas yang cukup tidak mungkin seluruh kerja yang menjadi tanggung jawab mereka dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan dari AD selaku kepala seksi pelaksanaan dan penataan ruang yang ditemui yang mengatakan:

“ tidak main-main dalam perencanaan tenaga ahli yang kita pergunakan adalah orang-orang yang sudah berintegritas dan professional dibidangnya begitu pula staf yang ada saya berani menjamin bahwa keseluruhan pegawai adalah orang-orang yang berkualitas professional dan berintegritas tentunya mereka harus mengembang tanggungjawab dengan baik. Saya rasa itu cukup membuktikan bahwa kita semua serius untuk kerja secara profesional”(wawancara AD, 23 oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas maka dapat di simpulkan bahwa dinas tata ruang mempekerjakan tenaga ahli yang sudah berintegritas dan profesional dalam mengerjakan suatu tanggung jawab sudah sesuai dengan standar operasional dan cukup membuktikan bahwa semua pegawai serius dalam bekerja.

Wawancara dengan informan AS selaku seksi pengendalian dan pemanfaatan ruang sebagai berikut:

“Semua tanggungjawab yang diberikan kepada kami selaku tenaga ahli kami harus menyelesaikanya dengan sangat baik dan tepat pada waktunya jika terlambat sedikit saja itu dapat mengakibatkan keterlambatan dalam bekerja kami bisa saja di komplek karena keterlambatan kerja kami makanya kami selalu bekerja sama dalam menjalankan tugas agar selesai dengan tepat pada waktunya. saya rasa demikian”(wawancara AS ,23 Oktober 2018)

Berdasarkan wawancara diatas dapat di simpulkan semua tanggungjawab yang diamanahkan kepada pegawai sudah sesuai dengan standar operasional prosedur dinas tata ruang dalam menjalankan tugas.

Dari hasil wawancara tersebut dan dilihat dari tabel ketentuan bangunan garis sempadan bangunan sebagai penulis dapat menarik kesimpulan bahwa semua sudah berjalan dengan baik namun, dalam kerja tidak harus cepat mendapatkan kepuasan hati apalagi dalam kinerja pegawai karena sebagai pegawai harus menghasilkan kerja secara kuantitas. Indikator kuantitas sudah tercapai, serta dalam suatu instansi pemerintah tanpa skil yang mempuni dimiliki para setiap pegawai tidak akan mampu menyelesaikan tugas yang diberikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh kemudian diperkuat dengan hasil wawancara, maka dapat simpulkan bahwa kuantitas kerja Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba sudah berada pada kateogi baik dengan indikator bahwa: a) Garis sempadan bangunan yang memenuhi kriteria Garis sempadan bangunan ketentuan tata bangunan sebesar 96,06% dan tersisa 4,72% yang tidak memenuhi kriteria ketentuan tata bangunan; b) Garis sempadan jalan yang memenuhi kriteria sebanyak 97,07% dan yang tidak memenuhi tinggal 3,81%; dan ketinggian serta amplop bangunan sudah mencapai 100%. Hal tersebut dicapai karena beberapa faktor diantaranya komitmen pegawai yang tinggi dalam menjalankan tugas, dukungan dari seluruh instansi Pemerintahan Kabupaten Bulukumba terhadap Perda RDTR dan Peraturan Zonasi, ketersediaan anggaran, dan dukungan masyarakat dan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan penataan kota yang baik.

3. Ketepatan Waktu

Ketepatan Waktu yaitu suatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilaksanakan di dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah diterapkan sebelumnya.

Ketepatan waktu (*timeliness*) Timeliness yaitu aspek pendukung relevansi. Ketika informasi tidak tersedia saat dibutuhkan atau tersedia setelah sekian waktu setelah pelaporan maka informasi tersebut tidak mempunyai nilai untuk tindakan masa depan. Informasi tersebut memiliki relevansi dan manfaat yang rendah. Timeliness berarti tersedianya informasi didalam pengambilan keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas pengaruhnya dalam mempengaruhi keputusan.

Ketepatan waktu adalah tolak ukur yang dapat dipakai apakah kinerja pegawai berjalan dengan sebagai mana yang diharapkan. Tidak dapat dipungkiri para pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk dapat diukur apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak baik sama sekali bahwa mereka harus menjalankan semua tugas.

Berkaitan dengan ketepatan waktu pelaksanaan program pada Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba, sudah direncanakan dengan baik, misalnya Tahun Anggaran 2018, sudah direncanakan dan disahkan oleh DPRD paling lambat pada Bulan November 2017. Dimana setiap rogram yang direncanakan harus selesai paling lambat Tanggal 31 Desember Tahun Berjalan.

Lebih lanjut, Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba telah membentuk tim wasdal dan telah merampungkan regulasi tentang tatacara pengenaan sanksi administrasi pelanggaran pemanfaatan ruang, Ditahun 2017 Tim telah melayangkan surat teguran kepada masyarakat sebanyak 120 surat teguran terdiri dari pelanggaran tidak memiliki ijin imb dan pelanggaran garis sempadan dari 120 surat teguran tersebut semuanya telah ditindak lanjuti terkait dengan pelanggaran yang disangkahkan oleh tim wasdal dan Tim wasdal telah melakukan tindakan secara persuasif kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran namun demikian masyarakat masih kurang memahami maksud dan langka-langka yang dilakukan oleh pemerinta terkait dengan penertiban bangunan, oleh karena itu diperlukan sosialisasi secara berkesenambungan baik di media cetak, elektronik, papan pengumuman dan secara langsung kepada masyarakat. Dimana semua program-program tersebut dilaksnakan berdasarkan waktu dan tahun anggaran yang telah ditetapkan.

Hasil kerja pegawai dalam pelaksanaan rencana tata ruang harus sesuai dengan waktu yang telah di tentukan sehingga sesuai yang diharapkan. Maka dari itu ketepatan waktu sangat dibutuhkan bagi setiap pegawai dalam menjalankan tugas yang telah diberikan.

Perlu ada peraturan yang mengikat semua pekerja agar mengacu pada hukum-hukum aturan tersebut yang harus ditaati dengan baik serta pucuk pimpinan harus menegaskan standar operasinal prosedur yang harus diikuti dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing pegawai agar tidak ada tumpah tindaih dalam menjalankan tugas dan fungsi pegawai agar mereka semua

memperhatikan waktu atau durasi dalam melakukan suatu pekerjaan kepada masyarakat.

Dan untuk mengukur indikator ketepatan waktu maka kita dapat menyimak wawancara dengan informan berikut ini.

Wawancara bersama MA Selaku kepala dinas tata ruang mengatakan bahwa:

“ Berbicara masalah ketepatan waktu penyelesaian serta target-target yang harus dicapai tentunya harus mendapatkan perencanaan yang matang setiap kita ingin menyelesaikannya dengan cepat dan tepat makanya kita selalu bekerja dengan memperhatikan Standar Operasional Prosedur dengan baik dan saya jamin semua pegawai bekerja dengan profesional dan baik sehingga pelaksanaan rencana tata ruang wilayah Kec. Ujung Bulu bias berjalan sesuai yang di inginkan”(wawancara SM ,23 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa birokrasi sudah menyadari tugas dan fungsi yang mereka jalankan menunjukkan kemajuan berfikir dan kemajuan kerja dinas terkait dalam menjalankan tugas dalam rencana tata ruang wilayah.

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan SF selaku kepala bidang tata ruang selanjutnya yang menyatakan.

”Dalam menjalankan program kerja yang sudah ditata dalam perencanaan kerja kami berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan dengan cepat tergantung dari tingkat kesulitan dalam proses implementasi perencanaan tersebut intinya kami harus mencapai target program perencanaan dengan cepat dengan waktu yang singkat agar kerja kami berjalan dengan efektif dan penuh tanggung jawab”(wawancara SF, 23 oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa dalam menjalankan program kerja para pegawai sudah sesuai dan semaksimal mungkin menyelesaikan pekerjaan dengan efektif dan target program perencanaan cepat dan tepat penuh tanggung jawab.

Lanjut hasil wawancara bersama AD selaku kepala seksi pelaksanaan dan penataan ruang mengatakan bahwa:

“Dalam program pelaksanaan penataan ruang wilayah kami intinya kami harus mencapai target program perencanaan dengan cepat dengan waktu yang singkat agar kerja kami berjalan dengan efektif dan penuh tanggung jawab ”(wawancara SF, 23 oktober 2018)

Hasil wawancara dengan diatas maka dapat di simpulkan program pelaksanaan penataan ruang sudah tepat waktu yang singkat dan efektif dan telah mencapai target program perencanaan dinas tata ruang.

Wawancara bersama AS Selaku kepala seksi pengendalian dan pemanfaatan ruang mengatakan bahwa:

“Dalam perencanaan perumusan yah sudah terlaksana dengan tepat waktu penyelesaian serta target-target yang harus dicapai tentunya harus mendapatkan perencanaan yang matang setiap kita ingin menyelesaikannya dengan cepat dan tepat makanya kita selalu bekerja dengan memperhatikan Standar Operasional prosedur”(wawancara AS, 23 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan suatu program dinas tata ruang sudah terlaksana dengan tepat waktu serta target-target telah di capai dengan memperhatikan standar operasional operasional.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh kemudian diperkuat dengan hasil wawancara, maka dapat simpulkan bahwa ketepatan waktu kerja Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba sudah berada pada kateogi baik dengan indikator dilihat dari penyelesaian program menpai 98% pada waktu yang telah ditentukan. Pegawai dalam menyelesaikan tugas yang diembannya dilakasnakan dengan penuh rasa tanggungjawab ini dapat dibuktikan dari hasil pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian dengan bertemu langsung dengan informan menanyakan hal yang terkait. Dan hasilnya sangat memuaskan seluruh pegawai

yang terkait sudah menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diberikan kepadanya saya selaku peneliti dan penulis dapat memberikan kesimpulan dengan mengambil pertimbangan dari hasil wawancara menyimpulkan semua tugas dapat diselesaikan dengan ketepatan waktu yang baik dan semua kinerja pegawai sangat baik sebab Ketepatan waktu adalah tolak ukur yang dapat dipakai dalam mengukur kinerja aparat birokrat berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan. Tidak dapat dipungkiri para birokrat-birokrat dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk dapat diukur apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak baik sama sekali bahwa mereka harus menjalankan semua tugas.

Lebih lanjut, untuk mencapai target dalam program kerja yang telah rencanakan, maka Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali, untuk memastikan berjalannya program yang telah direncanakan. Hal tersebut berdampak pada penyelesaian program kerja sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu mengacu pada peraturan Daerah bahwa laporan pertanggungjawaban dari setiap program kerja paling lambat Tanggal 15 Desember Setiap Tahun berjalan, hal inilah yang mendorong penyelesaian program kerja tepat waktu, karena konsekuensi yang diterima jika program kerja tidak berjalan yaitu anggaran akan dikembalikan ke kas Daerah yang akan berdampak pada rendahnya serapan anggaran dan program kerja. Dan jika hal tersebut terjadi, maka akan mempengaruhi capaian kinerja tahun berikutnya, dan

akan ada sanksi pemotongan anggaran tahun berikutnya jika program kerja tidak dilaksanakan tepat waktu.

4. Efektifitas

Efektivitas merupakan suatu ukuran tentang bagaimana suatu sasaran atau target yang telah ditentukan tercapai yang mengacu pada hasil akhir. Hasil akhir ialah tujuan utama. Semakin mencapai target yang ditentukan maka efektivitasnya semakin baik.

Sikap kerja yang efektifitas dan efisien lebih ditekankan kepada suatu usaha didalam mewujudkan strategi usaha, target pekerjaan, dan taktik bisnis dalam mengelola usaha. sikap efektifitas dan efisien harus dimiliki oleh setiap wirausaha didalam mewujudkan bisnisnya menjadi bisnis yang memiliki sistem standar operasional yang berorientasi pada mutu. Maka dari ini diterapkanlah jadi berpribadi yang mempunyai sikap yang efektifitas, di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna untuk itu jadilah manusia yang memiliki semangat tinggi dan yang tidak mudah untuk menyerah dalam hal apapun.

Oleh karena itu setiap birokrat harus memiliki ke2 sifat tersebut agar usaha yang dilaksanakan pun dapat tercapai sesuai dengan harapan. Untuk mempunyai ke2 sikap tersebut memanglah tidak mudah, kita harus mampu mengendalikan diri dari rasa malas, bosan, galau ataupun sebagainya. etos kerja merupakan salah satu cara untuk membentuk sikap kedua hal tersebut, bersungguh-sungguh dalam mencapai kesuksesan.

Dapat dikatakan efektif apabila program ini hasilnya ialah mampu mengurangi jumlah tingkat kemiskinan masyarakat yang ada sehingga sesuai

dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Tingkat efektivitas dapat dilihat dan dinilai dari hasil yang telah didapatkan. apabila output atau hasil yang didapatkan sesuai atau mencapai target sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, maka hal itu dapat dikatakan efektif.

Efektifitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah sesuatu alternatif mencapai hasil (akibat) diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakan kebijakan tersebut. Dalam proses perencanaan program yang ingin dicapai adalah penataan ruang dikecamatan ujung bulu. Untuk mengukur sebuah efektifitas waktu yang ada diharapkan semua pegawai sebagai penyelenggara pelayanan public seiring atau selalu dikeluhkan karena ketidak efisien dan tidak efektifitas untuk mendorong suatu terbentuknya pemerintahan yang bersih dan berwibawah maka segenap aparatur pemerintahan wajib melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik kekuatan birokrasi sebenarnya bisa menjadi mesin penggerak yang luar biasa apabila mampu didaya gunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan uraian indikator efektivitas di atas intinya dapat dilihat bahwa efektivitas merupakan suatu pengukuran dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan ukuran-ukuran ketepatan efektivitas dimana suatu target atau sasaran dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba telah menerapkan sistem efektivitas untuk mencapai tujuan organisasi yang ditandai dengan

- a. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran yang sangat jelas.

- b. Proses perencanaan strategis meliputi perencanaan yang disusun dalam rencana strategis dalam kurung waktu tertentu dan berkesenambungan meliputi penetapan kebijakan program dan kegiatan dalam pencapaian kinerja dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan organisasi yang dihadapi.
- c. Pencapaian kinerja sasaran *output* didukung informasi mengenai kinerja Output yang dapat diandalkan sehingga capaian kerjanya dapat dibandingkan dari tahun sebelumnya.
- d. Pencapaian kinerja sasaran *outcome* dapat menggambarkan hasil dan informasi mengenai kinerja *outcome* yang dapat diandalkan sehingga capaian kerjanya dapat dibandingkan dari tahun sebelumnya.

Perilaku birokrasi dituntut untuk efektif dalam bekerja agar tugas yang dijalankan birokrasi sebagai kumpulan individu dengan lingkungan dalam kaitanya dengan phenomena perilaku birokrasi maka kedudukan peran dan fungsinya tidak dapat dipisahkan dari individu selaku aparat yang mempunyai persepsi nilai motivasi dan pengetahuan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dan tangun jawab sosial.

Berdasarkan wawancara dengan MA selaku kepala dinas tata ruang yang terkait seperti berikut:

“sumberdaya manusia yang digunakan sudah sesuai dengan peruntungnya ditempatkan pada posisi yang semestinya sesuai dengan skil kemampuan mereka dan masing-masing harus menyelesaikan tugas dengan tepat dan cepat tanpa kualifikasi yang tertentu tidak mungkin kami para pimpinan akan menempatkan tidak sesuai dengan skil karena akan dapat menghambat kerja seluruh pegawai yang ada makanya tangung jawab yang diberikan harus diselesaikan masing-masin dan

dipertanggung jawabkan sendiri-sendiri”(wawancara MA ,23 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas maka dapat di simpulkan bahwa sumber daya manusia sudah sesuai dengan peruntukannya dan di tempatkan pada posisi yang bagaimana mestinya

Tidak jauh berbeda dengan informan SF selaku kepala bidang tata ruang yang mengatakan :

“ untuk mendapatkan hasil yang baik dalam program perencanaan kerja kita semua terlibat dengan aktif membangun kerja sama dan komunikasi yang baik dalam mencapai hasil yang baik pula, baik itu antar sesama pegawai sampai pada masyarakat yang kami anggap memiliki perang yang penting untuk menyelesaikan semua program kerja.(wawancara SF ,23 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara bersama informan kepala bidang tata ruang yang mengatakan bahwa dalam program perencanaan kerja sudah efektif karena semua pegawai terlibat dan aktif membangun kerja sama dan komunikasi yang baik untuk semua program kerja.

Lanjut hasil wawancara bersama AD selaku kepala seksi pelaksanaan dan penataan ruang mengatakan :

“dalam penyelesaian pekerjaan kami melibatkan beberapa pegawai dinas tata ruang di setiap kecamatan untuk mendapatkan hasil yang baik dalam program perencanaan kerja kita semua terlibat dengan aktif membangun kerja sama dan komunikasi yang baik dalam mencapai hasil yang baik pula”(wawancara AD,23 Oktober 2018)

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat di simpulkan bahwa dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sudah efektif dan efisien karena beberapa pegawai dinas tata ruang di setiap kecamatan dilibatkan dalam menyelesaikan suatu program perencanaan.

Hasil wawancara bersama AS selaku kepala seksi pengendalian dan pemanfaatan ruang mengatakan bahwa :

“ya sudah sesuai karena dalam melaksanakan tugas itu sudah efektif dan kami menempatkan pada posisi yang semestinya sesuai dengan skil kemampuan mereka dan masing-masing harus menyelesaikan tugas dengan tepat dan cepat tanpa kualifikasi” (wawancara AS ,23 oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas maka dapat di simpulkan dalam pelaksanaan tugas sudah efektif karena menempatkan pegawai dinas tata ruang pada posisi yang semestinya sesuai dengan skil kemampuan yang dimiliki.

Dari hasil wawancara bersama 4 orang informan diatas maka dapat di simpulkan bahwa Setiap individu mempunyai karakteristik tersendiri dan karakteristik tersebut akan dibawahnya ketika ia memasuki lingkungan tertentu karakteristik ini berupa kemampuan kepercayaan pribadi , kebutuhan, pengalaman dan sebagainya demikian pula hanya dengan organisasi.

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa semua pengukuran efektifitas berjalan dengan baik meskipun masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing hal-hal yang masih menjadi kekurangan didalamnya dari semua pencapaian target kerja jangan sampai para birokrat mendapat kepuasan yang terlalu cepat dan mereka harus lebih meningkatkan proses kerja dengan lebih giat lagi agar tercapai kinerja yang prima dalam tubuh birokrasi pemerintahan karena kita ketahui bersama perilaku organisasi yang baik sopan dan cermat dalam melakukan tindakan serta terukur.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh kemudian diperkuat dengan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa ketepatan efektifitas kerja Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba sudah berada pada kategori baik karena tujuan yang telah direncanakan sebelumnya (sasaran) dapat tercapai dengan indikator yaitu: program kerja yang dibuat mendukung tercapainya visi dan misi, keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pada Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba, sumberdaya manusia ditempatkan pada posisi sesuai dengan kompetensinya, kerjasama yang baik antara sesama pegawai dalam menyelesaikan tugas, penyelesaian program kerja tepat waktu, dan anggaran sesuai dengan alokasi.

5. Komitmen Kerja

Komitmen kerja adalah profesionalitas dari para pegawai dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan padanya semua pegawai harus dapat menyelesaikan kerja yang diberikan kepadanya sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dapat diselesaikan dengan cepat para pegawai juga harus berkomitmen mengedepankan kepuasan terhadap kinerja yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, mereka dalam mengurus segala kepentingan dengan standar operasional prosedur dengan baik.

Mencapaian tujuan organisasi dipengaruhi oleh budaya kerja yang dikembangkan didalam sebuah organisasi tersebut. Pengembangan budaya kerja harus diawali dengan pembentukan komitmen yang tinggi dari semua anggota organisasi baik pimpinan maupun atasan.

Untuk mengembangkan sebuah organisasi harus jelas visi dan misi yang akan dicapai. Disinilah diperlukan budaya kerja dan Komitmen sebagai konsep diri setiap individu didalam organisasi yang membentuk etos kerja sebagai budaya individu yang berpengaruh terhadap perilaku dalam pelaksanaan tugasnya.

Oleh sebab itu nilai-nilai individu yang ada didalam pola pikir birokrasi harus sesuai dan dapat mendukung penerapan nilai-nilai yang mengikat tersebut. Apabila mempunyai nilai-nilai yang justru bertentangan dan menghambat terwujudnya nilai-nilai keterikatan yang seharusnya ditetapkan oleh seseorang maka konsekuensinya yang bersangkutan harus “mampu menghilangkan” nilai-nilai yang bertentangan dan menghambat yang ada di dalam pola pikirnya tersebut.

Misalnya mempunyai pola pikir bekerja mencari kekayaan, egois, bekerja berorientasi pada kepentingan pribadinya sendiri, kelompok atau golongannya sendiri, bekerja tanpa keterikatan disiplin waktu, atau tampilan cara berpakaian, gaya hidup yang “*tidak dianjurkan*” dalam organisasi pemerintah, dll.

Itu semua harus sanggup dilupakan atau dihilangkan dan yang ada dan dikembangkan ialah pola pikir yang mendukung terwujudnya “sistem nilai” yang menjadi landasan pelaksanaan tugas tersebut.

Komitmen kerja pada Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukuma tercermin dari kesesuai anatara visi, misi, tujuan, dan sasaran, yang dituangkan dalam indikator kinerja utama yang diprogramkan dan direncanakan setiap tahunnya. Berdasarkan program kerja yang sudah ditetapkan, sehingga Dinas Tata Ruang

Kabupaten Bulukuma memiliki komitmen untuk mengerjakan semua program kerja sesuai dengan rencana.

Komitmen kerja ditandai dengan :

- a. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang yang Berkualitas dan Implementatif, yang bertujuan untuk mewujudkan keserasian Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam suatu system pembangunan yang berkelanjutan dengan sasaran terkendalinya pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan manajemen penataan ruang yang efektif dan percepatan pembangunan yang berkelanjutan, dan
- b. Peningkatan Pembinaan dan Pengendalian, Pengawasan Pembangunan Perumahan dan Permukiman, Bangunan Gedung serta sarana dan prasarana yang bertujuan untuk mewujudkan keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang, kesadaran dan ketaatan hukum dalam suatu system pembangunan yang berkelanjutan dengan sasaran meningkatkan sinergitas dan keterpaduan kebijakan dan program pembangunan bidang pengendalian dan pengawasan serta kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, dunia usaha dan aparatur daerah.
- c. Meningkatkan peran serta aktif segenap lapisan masyarakat dan aparatur dalam rangka pemanfaatan ruang kota.
- d. Menetapkan skala prioritas Anggaran Satuan Kinerja Tahun Anggaran 2017-2018 agar penggunaannya menjadi efektif dan efisien.

- e. Menjadikan kebijakan daerah sebagai acuan dalam mengendalikan pemanfaatan ruang kota, agar semua ketentuan dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan bidang Penataan Kota dan bidang Pengendalian dan Pengawasan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang kota.

Sebagai salah satu bagian pelayanan birokrasi komitmen kerja adalah proses pelayanan oleh karena itu secara tipikal formulasi komitmen kerja merupakan tindakan yang berpola yang dilakukan sepanjang waktu dalam menjalankan tugas yang dilakukan dalam pelayanan publik yang tentunya harus mengikuti SOP yang benar kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pegawai dalam menalakan tugasnya haruslah sigap dan cermat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama MA selaku Kepala Dinas Tata Ruang sebagai berikut :

” semua harus mampu menyelesaikan amanah pekerjaan yang diberikan kepadanya sebagai komitmen kerja birokrat terhadap pelayanan yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan pelayanan saya rasa demikian kalau kita berbicara masalah komitmen kerja. Yang namanya orang yang ingin kerja apalagi dalam ruang lingkup birokrasi pelayanan publik memang harus memahami yang namanya komitmen kerja agar seluruh kerjaan dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. (Wawancara MA, 23 Oktober 2018)

Dapat di simpulkan bahwa pernyataan informan diatas yang berargumen bahwa semua yang berada dalam lingkup kerja yang terkait harus memiliki komitmen kerja yang penuh tangun jawab yang harus diselesaikan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan baik.

Lanjut hasil wawancara dengan SF selaku Kepala Bidang Tata Ruang Sebagai berikut :

“yah betul semua harus punya komitmen kerja terhadap tanggung jawab yang diberikan kepada kami, dan kita juga harus saling bahu membahu dalam mengerjakan tugas agar target dapat tercapai dengan baik, tentunya harus ada kerja sama antara satu sama lain yang saling mendukung, saya rasa demikian. (Wawancara SF, 23 Oktober 2018)

Tidak jauh berbeda dengan informan AD Kepala Seksi Pelaksanaan dan Penataan Ruang yang mengatakan bahwa.

“tentu harus ada kerja sama dalam menjalankan tugas misalkan saling membantu dalam menyelesaikan tugas, serta berkordinasi sesama pegawai agar kerjaan berjalan dan terkordinir dengan baik dan rapih sehingga tugas terselesaikan dengan cepat karena ada sifat saling gotongroyong dalam menjalankan tugas bagi yang kesulitan dalam menjalankan tugas yang diberikan kepada pegawai saya rasa demikian adanya. (Wawancara AD, 23 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara di atas bersama kepala bidang tata ruang dan kepala seksi pelaksanaan dan penataan ruang maka dapat di simpulkan bahwa dalam menjalankan tugas pegawai dinas tata ruang di setiap program pelaksanaan mempunyai komitmen kerja dan sesuai dengan teori yang di gunakan dalam mengukur kinerja.

Lanjut hasil wawancara bersama AS selaku kepala seksi pengendalian dan pemanfaatan ruang :

“ya sudah mampu karena sebelum kami mengamanahkan pekerjaan yang diberikan kepadanya sebagai komitmen kerja birokrat terhadap pelayanan yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan pelayanan saya rasa demikian kalau kita berbicara masalah komitmen kerja”(wawancara AS , 23 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat di simpulkan bahwa setiap birokrat dinas tata ruang sudah mempunyai komitmen kerja terhadap tingkat loyalitas yang dimiliki oleh aparat dinas tata ruang dalam mempertanggung jawabkan tugas dan fungsinya.

Dari hasil penelitian dari berbagai indikator pengukur yang telah ditanyakan kepada seluruh informan yang dianggap dapat memberikan informasi dalam mengukur kinerja dinas penataan ruang di kecamatan ujung bulu. Penulis dapat memberikan kesimpulan semua sudah berjalan dengan baik namun para pegawai tidak mesti langsung harus berpuas hati dan perlu mengevaluasi kembali kinerja mereka jika berjalan dengan baik maka harus dipertahankan dan meningkatkan kinerja mereka dan adapun beberapa dari kekurangan hasil kerja mereka harus memperbaiki dan lebih mengacu lagi pada SOP (Standar Oprasional Prosedur) yang berlaku untuk mencapai target program perencanaan kerja yang ingin dicapai dengan profesional dan bertanggung jawab terhadap hasil kerja yang dihasilkan.

Lebih lanjut, Sistem Kinerja Pemerintah dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan sistem yang memadai, secara periodic mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan dilakukan melalui proses penyusunan rencana strategis, penyusunan kinerja dan pengukuran kinerja. Didalam kerangka kinerja ini berperan sebagai alat kendali, alat kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka lakip ini juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik.

Secara umum Laporan Kinerja Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba ini dapat terlaksana dengan baik. Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba sehingga pencapaian indikator kinerja yang sulit untuk dilakukan pengukuran disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan aparatur dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tata Ruang yang menjadi tugas dan fungsi untuk merumuskan menentukan baik sasaran strategis maupun indikator kinerja.

Terlepas dari semua itu ada beberapa Indikator kerja yang telah mencapai target yang di inginkan dengan capaian rata-rata 100 % bahkan ada yang melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini cukup untuk memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan kinerja Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba, tentu pula ada beberapa indicator kerja yang capaiannya kurang dari 100 % atau capaiannya di bawah 50 % pada tahun tahun berikutnya akan kami upayakan perbaikan guna peningkatan kinerja Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh kemudian diperkuat dengan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa komitmen kerja Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba sudah berada pada kateogi baik dengan indikator yaitu komitmen kerja pegawai terhadap tanggung jawab yang diberikan cukup tinggi, hubungan dan pola komunikasi yang baik serta kerjasama tim dalam setiap pekerjaan. Lebih lanjut, komitmen kerja dilihat dari upaya peningkatan kinerja melalui perbaikan program kerja dari waktu ke waktu, loyaliyas pegawai terhadap

organisasi cukup tinggi, serta tanggungjawab pegawai terhadap tugas pokok dan fungsinya sudah berjalan sesuai dengan tupoksi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kualitas

Kualitas kerja Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba berada pada kategori tinggi tercermin dari pencapaian indikator utama dari program kerja mencapai 97% dengan setiap program yang dilaksanakan diawali dengan perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal. Dari hasil analisis wawancara dengan informan dengan mendengarkan serta menganalisa penulis dapat menyimpulkan Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk membangun dan menata wilayah yang nyaman, ramah terhadap lingkungan pada umumnya serta pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus sesuai dengan SOP yang telah ditentukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam melakukan tugas dan fungsi pegawai tersebut serta selalu mengedepankan hasil pelayanan yang baik. Dalam perekrutan pegawai pun tidak dilakukan dengan sembarangan melainkan dengan perencanaan yang tepat serta sumberdaya manusia yang digunakan juga sumberdaya manusia yang mempunyai dengan seluruh pegawai bertitel pendidikan sarjana dan ada beberapa bagian yang sudah berpredikat.

2. Kuantitas

Bahwa dari segi kuantitas sudah berjalan dengan baik namun dalam kerja tidak harus cepat mendapatkan kepuasan hati apalagi dalam melakukan pelayanan publik karena birokrasi harus mendahulukan kepuasan masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat. Indikator tersebut sudah tercapai, serta dalam suatu instansi pemerintah tanpa skil yang dimiliki para setiap pegawai tidak akan mampu menyelesaikan tugas yang diberikan.

3. Ketepatan waktu

Mengenai ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas sudah berjalan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab ini dapat dibuktikan dari hasil pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian dengan bertemu langsung dengan informan menayakan hal yang terkait. Dan hasilnya sangat memuaskan seluruh pegawai yang terkait sudah menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diberikan kepadanya saya selaku peneliti dan penulis dapat memberikan kesimpulan dengan mengambil pertimbangan dari hasil wawancara menyimpulkan semua tugas dapat diselesaikan dengan ketepatan waktu yang baik dan semua kinerja pegawai sangat baik sebab Ketepatan waktu adalah tolak ukur yang dapat dipakai apakah pelayanan aparat birokrat berjalan dengan sebagai mana yang diharapkan. Tidak dapat dipungkiri para birokrat-birokrat dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk dapat diukur apakah sudah

berjalan dengan baik atau tidak baik sama sekali bahwa mereka harus menjalankan semua tugas .

4. Efektivitas

Mengenai efektivitas berjalan dengan baik meskipun masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing hal-hal yang masih menjadi kekurangan didalamnya dari semua pencapaian target kerja jangan sampai para birokrat mendapat kepuasan yang terlalu cepat dan mereka harus lebih meningkatkan proses kerja dengan lebih giat lagi agar tercapai pelayanan yang prima dalam tubuh birokrasi pelayanan publik karena kita ketahui bersama perilaku organisasi adalah memberikan pelayanan dengan konsep yang baik sopan dan cermat dalam melakukan tindakan serta terukur.

5. Komitmen kerja

Komitmen kerja sudah berjalan dengan baik namun para pegawai tidak mesti langsung harus berpuas hati dan perlu mengevaluasi kembali kinerja mereka jika berjalan dengan baik maka harus dipertahankan dan meningkatkan kinerja mereka dan adapun beberapa dari kekurangan hasil kerja mereka harus memperbaiki dan lebih mengacu lagi pada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku untuk mencapai target program perencanaan kerja yang ingin dicapai dengan profesional dan bertanggung jawab terhadap hasil kerja yang dihasilkan.

B. Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas dan menganalisa hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis merasa perlu memberikan masukan sebagai berikut. walaupun dalam proses penelitian sudah sangat berjalan dengan baik bukan berarti tidak ada kekurangan yang terjadi didalam proses penyelesaian program perencanaan yang ingin dicapai para aparat pegawai pimpinan dan staf harus mempertahankan kinerjanya dengan baik jika perlu lebih ditingkatkan lagi demi tercapainya tata aturan pemukiman kota yang indah dan pemanfaatan ruang yang ada dimuka bumi tertata dengan baik sehingga pemukiman-pemukiman kumuh dapat teratasi dan ditata dengan indah tak terkecuali di kecamatan ujung bulu di kabupaten Bulukumba Sulawesi selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cokroaminoto.(2007). *Membangun kinerja melalui motivasi kerja karyawan*. Diambil dari www.cokroaminoto.wordpress.com
- Guritno, Bambang dan Waridin. (2005). *Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Perilaku Kepemimpinan, Kepuasan Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja*. JRBI.Vol 1. No 1. Hal: 63-74.
- Hakim, Abdul. (2006). *Analisis Pengaruh Motivasi, Komitmen Organisasi Dan Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah*. JRBI.Vol 2. No 2. Hal: 165-180.
- Jayadinata, T. Johara (1999). *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*. Institut Teknologi Bandung
- Keban, T. Yeremias.(2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta
- Mahsun, M.(2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik Edisi Pertama EPFE* Yogyakarta. Yogyakarta
- Mustopadidjaja AR,.(2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi,Implementasi Dan Evaluasi Kinerja*, LAN RI Jakarta: Duta Pertiwi Foundation
- Mangkunegara, (2006), *Perencanaan Dan Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia*, Pen. PT Refika Aditama
- Mas'ud, Fuad, (2004), *Survai Diagnosis Organisasional, konsep danAplikasi*, Semarang : BP Undip.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. (2005). *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*. Jakarta : UI Press.
- Rahmatullah, P. 2009. *Pneumonitis Dan Penyakit Paru Lingkungan*. Jakarta: Pusat Penerbitan Ilmu Penyakit Dalam. Jilid III Edisi V .364 : 2279-2296.
- Suyadi Prawirosentono. (2008). *Manajemen Sumber Daya ManusiaKebijakanKinerja Karyawan*". Yogyakarta:BPFE.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tisnaadmidjaja, D.A. (1997). *Pranata Pembangunan*. Bandung: Universitas Parahyangan; halaman 6.

Staatsblad 1948 No. 168 / *Depertemen Pekerjaan Umum ,Undang-undang pembentukan.*

Staatblad 1949 No.40 *Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kota*

Undang-undang N0.24 Tahun 1992 *tentang Penataan Ruang*

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 *tentang Penataan Ruang.*

UU No. 26 Tahun 2007 (UUPR)

L

A

M

P

9

R

A

N

Gambar Rumah Di Pinggiran Sungai





Gambar pemukiman kumuh



